

**ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI
SAK ETAP PADA UMKM**

(Studi Kasus Pada Koperasi Wanita Sri Rejeki Di Kota Blitar)

SKRIPSI



Oleh :

Ahmad Riza Fahtaromi

NIM : 12520101

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

**ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI
SAK ETAP PADA UMKM**

(Studi Kasus Pada Koperasi Wanita Sri Rejeki Di Kota Blitar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

Ahmad Riza Fahtaromi

NIM : 12520101

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK ETAP
PADA UMKM**

(Studi Kasus Pada Koperasi Wanita Sri Rejeki Di Kota Blitar)

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Riza Fahtaromi

NIM : 12520101

Telah disetujui 06 April 2017

Dosen Pembimbing

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.SA
NIPT. 19751030 20169801 2 048

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Hj. Nurul Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIPT. 19722 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK ETAP
PADA UMKM
(STUDY KASUS KOPERASI DI KOTA BLITAR)**

SKRIPSI

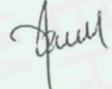
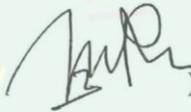
Oleh
AHMAD RIZA FAHTAROMI

NIM : 12520101

Telah Dipertahankan di Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima
Sebagai salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 26 April 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Penguji I
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., AK., CA : ()
NIP 19761019 200801 2 011
2. Penguji II
Nawirah, SE., MSA., AK., CA : ()
3. Penguji III (Pembimbing)
Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA : ()
NIP 19751030 20160801 2 048

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE, M.Si, Ak, CA
NIP 19720322 200801 2 005

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Riza Fahtaromi

Nim : 12520101

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK ETAP PADA UMKM (Studi kasus Koperasi Wanita Sri Rejeki di Kota Blitar)

Adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikat**” dari orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain bukan menjadi tanggung jawab Dosen pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 06 Januari 2017

Hormat Saya,



Ahmad Riza Fahtaromi

Nim: 12520101

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi penulis sehingga tugas akhir skripsi ini dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang Tua dan Keluarga

Skripsi ini dengan bangga penulis persembahkan kepada orang tua dan seluruh keluarga tercinta. Karena tanpa adanya dukungan baik moril maupun materil dari orang tua dan keluarga skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik.

2. Ibu Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE.,MSA

Atas dukungan dan bimbingan dari beliau, penulis mengucapkan terima kasih banyak. Karena dukungan dan bimbingan beliau sangat diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. Semua Teman dan Sahabat

Tidak lupa penulis persembahkan skripsi ini kepada teman-teman, baik teman yang tinggal bersama selama masa perkuliahan maupun teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat terus menerus kepada penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan semua.

HALAMAN MOTTO

“Keberhasilan adalah sebuah proses.

Niatmu adalah awal keberhasilan.

Peluh keringatmu adalah penedapnya”



KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK ETAP PADA UMKM (Studi Kasus pada Koperasi Wanita Sri Rejeki di Blitar)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujia Raharjo selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Salim Al-Idrus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak, CA selaku Ketua jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.SA selaku Dosen Pembimbing pada skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Kakek, Nenek, Ayah, Ibu serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a.
7. Pengurus Koperasi Wanita Sri Rejeki yang turut membantu dalam penelitian ini.
8. Seluruh teman seperjuangan akuntansi angkatan 2012 yang selalu memberikan saran serta masukan untuk kebaikan penulis.
9. Hildayati Permani, S.Pd seorang wanita hebat yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Seluruh teman di BIG BROTHERS yang telah membantu serta menemani penulis dan selalu menjadi keluarga di Malang.
11. Dan seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu jalannya penelitian ini yang tidak bisa disebut semuanya.

Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin Ya Robbal'Alamin.

Malang, 26 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Secara Praktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teori	12
2.2.1 Akuntansi	12
2.2.1.1 Pengertian Akuntansi	12
2.2.1.2 Siklus Akuntansi	13
2.2.2 Laporan Keuangan	17
2.2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan	17
2.2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan	18
2.2.2.3 Pihak-pihak memerlukan Laporan Keuangan	20
2.2.3 Aset	22
2.2.3.1 Pengakuan Aset	22
2.2.3.2 Pengukuran Aset	23
2.2.3.3 Pengungkapan Aset	24
2.2.4 Kewajiban	25
2.2.4.1 Pengakuan Kewajiban Diestimasi	25
2.2.4.2 Pengukuran Kewajiban Diestimasi	25
2.2.4.3 Pengungkapan Kewajiban Diestimasi	26
2.2.5 SAK ETAP	27

2.2.5.1 Sejarah Singkat SAK ETAP.....	27
2.2.5.2 Ruang lingkup SAK ETAP	29
2.2.5.2 Penyusunan Laporan Keuangan SAK ETAP.....	30
2.2.6 Koperasi	33
2.2.6.1 Pengertian Koperasi	33
2.2.6.2 Sejarah Koperasi	34
2.2.6.3 Koperasi Simpan Pinjam	36
2.2.7 UMKM.....	37
2.2.7.1 Pengertian UMKM.....	37
2.2.7.2 Karakteristik Usaha Kecil	39
2.2.7.3 Karakteristik Usaha Menengah	39
2.2.7.4 Pengenaan Tarif Pajak.....	40
2.8 Integrasi Keislaman	41
2.8.1 Tujuan Laporan Keuangan.....	46
2.9 Kerangka Berfikir	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Lokasi Penelitian.....	50
3.3 Jenis dan Sumber data.....	50
3.3.1 Data Primer	51
3.3.2 Data Sekunder	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5 Teknik Analisa Data	52
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
4.1 Paparan Data	55
4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Wanita Sri Rejeki	55
4.1.2 Visi dan Misi.....	55
4.1.3 Struktur Organisasi	56
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	60
4.2.1 Deskripsi Data Laporan Keuangan Kopwan Sri Rejeki	60
4.3 Pembahasan.....	62
4.3.1 Evaluasi laporan keuangan Kopwan Sri Rejeki.....	62
4.3.1.1 Penyajian Laporan Neraca.....	63
4.3.1.2 Penyajian Laporan Laba Rugi	67
4.3.1.3 Penyajian Laporan Arus Kas	70
4.3.1.4 Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas	73
4.3.1.5 Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	76
4.3.2 Kendala dalam penerapan SAK ETAP	81
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	83

5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4.1 Neraca Koperasi Kopwan Sri Rejeki.....	64
Tabel 4.2 Neraca Sesuai SAK ETAP.....	66
Tabel 4.3 Laporan Perhitungan Hasil Usaha.....	67
Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi sesuai SAK ETAP.....	69
Tabel 4.5 Laporan arus kas sesuai SAK ETAP.....	71
Tabel 4.6 Permodalan.....	74
Tabel 4.7 Laporan Perubahan Ekuitas sesuai SAK ETAP.....	76
Tabel 4.8 Catatan Atas Laporan Keuangan.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi.....	14
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	NERACA KOPERASI WANITA SRI REJEKI
LAMPIRAN 2	LAPORAN HASIL USAHA
LAMPIRAN 3	PERMODALAN
LAMPIRAN 4	DAFTAR WAWANCARA
LAMPIRAN 5	BUKTI KONSULTASI



ABSTRAK

Ahmad Riza Fahtaromi, 2017, SKRIPSI, Judul: “Analisis Penerapan Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP pada UMKM (Studi Kasus pada Koperasi Wanita Sri Rejeki di Kota Blitar)”.

Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA

Kata Kunci : UMKM, Laporan Keuangan, SAK ETAP, Koperasi Wanita Sri Rejeki

UMKM dihadapkan pada terbatasnya akses pada sumberdaya produktif, terutama permodalan, teknologi, informasi, dan pasar karena tidak adanya informasi yang dapat digunakan oleh manajemen, calon investor maupun kreditur dalam menilai perkembangan UMKM dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit. Namun pelaksanaan pembukuan tersebut merupakan hal yang sulit bagi UMKM karena keterbatasan kemampuan mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM. Salah satu standar akuntansi yaitu SAK ETAP merupakan standar keuangan yang ditetapkan untuk mempermudah UMKM menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif.

Data yang akan digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan diperoleh dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian pada Koperasi Wanita Sri Rejeki menunjukkan bahwa laporan keuangan yang digunakan masih menggunakan *single entry* atau masih menggunakan pembukuan dengan metode *cash basis*. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat banyak kesalahan dalam pencatatan keuangannya. Koperasi Wanita Sri Rejeki dalam laporan neraca yang disusun tidak menyertakan nilai aset tetap dan hutang jangka panjang. Laporan keuangan yang digunakan Koperasi Wanita Sri Rejeki belum sesuai dengan SAK ETAP.

ABSTRACT

Ahmad Riza Fahtaromi, 2017, THESIS, Title: “Analysis of the application of Appropriate financial statements SAK ETAP on the SMEC (Case Study on the Aglaonema Women Cooperative Blitar)

Supervisor: Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA.

Key Word: SMALL MEDIUM ENTERPRISES, Financial Statements, SAK ETAP, Aglaonema Women Cooperative.

SMALL MEDIUM ENTERPRISES faced with the limited access to productive resources, particularly capital, technology, information, and the market due to the absence of information that can be used by management, potential investors or creditors in assessing the development of the SMALL MEDIUM ENTERPRISES with adequate accounting so entrepreneurs can meet the requirements in SMEC filing credit. However, the implementation of the accounting process, and presumption that the financial report is not that important for SMALL MEDIUM ENTERPRISES draw up and present a more informative financial reports.

The data will be used to analyze and evaluate the data used in this study is associated with the application of SAK ETAP on financial reports obtained by the technique of observasi data collection, documentation, interviews and literature studies with descriptive qualitative research methods.

The result of the women’s Cooperative research on Aglaonema shows that financial statements used are still using single entry or accounting method still uses cash basis. So that in practice there are many errors in the recording of the Financials. Women’s cooperative in Aglaonema report balance sheet drawn up does not include the value of the fixed assets and long-term debt. The financial statements used Female Operatives Agalonema yet in accordance with SAK ETAP.

مجرد

احمد ريزا الفاحترأمي ، ٢٠١٧ ، اطروحه ، عنوان: "تحليل تطبيق البيانات المالية المناسبة التي تتناول الوثيقة المتعلقة بالمرآه التعاونية".

مشرف: هجه نينا داكون السيف , بدل الاقامه المخصص للبعثة.

الكلمات الرئيسية: المؤسسات الصغيرة المتوسطة ، البيانات المالية ، الصك التعاوني للمرآه في سري.

المشاريع الصغيرة المتوسطة التي تواجه محدوديه الوصول إلى الموارد الانتاجيه ، ولا سيما راس المال والتكنولوجيا والمعلومات والسوق نظرا لعدم وجود معلومات يمكن ان تستخدمها الاداره أو المستثمرون المحتملون أو الدائنون في تقييم تطوير المؤسسات الصغيرة المتوسطة الحجم مع المحاسبه الكافية لذلك يمكن لأصحاب المشاريع الوفاء. ومع ذلك ، فان تنفيذ المحاسبه أمر صعب بالنسبة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة بسبب محدوديه القدره علي المحاسبه ، وتعقد العمليه المحاسبية ، وافترض ان التقرير المالي ليس مهما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة. ومن المعايير المحاسبية التي وضعتها الشركة النموذجية التي يمكن ان تخفف من المؤسسات المالية الصغيرة المتوسطة الحجم وتقدم تقارير مالية أكثر أفاده.

ستستخدم البيانات لتحليل وتقييم البيانات المستخدمة في هذه الدراسة وترتبط بتطبيق الصك المتعلق بالتقارير المالية التي يتم الحصول عليها بواسطة تقنيه جمع البيانات والتوثيق والمقابلات والدراسات الادبيه بأساليب البحث النوعي الوصفي.

وتبين نتائج البحوث التعاونية التي تجربها المرآه بشأن السيدة الرحيمه ان البيانات المالية المستخدمة ما زالت تستخدم طريقه الدخول أو المحاسبه التي لا تزال تستخدم أساسا نقديا. بحيث في الممارسه العمليه هناك العديد من الأخطاء في تسجيل المالية. ولا تشمل التعاونيات النسائية في الميزانية العمومية للتقرير الذي وضعته قيمه الأصول الثابتة والديون الطويلة الأجل. واستخدمت البيانات المالية النساء العاملات في الوكالة وفقا لما ذكرته الوكالة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Indonesia sebagai negara berkembang, lebih menitik beratkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Proses ini berpengaruh langsung kepada berbagai bentuk usaha di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, di Indonesia terbentuk berbagai macam jenis usaha, baik usaha berskala kecil maupun usaha berskala besar. Di era globalisasi, berbagai jenis usaha tersebut dituntut untuk lebih maju dan dapat bertahan dalam menjalankan jenis usahanya (Saptantinah, 2010).

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Pada pasca krisis tahun 1997 di Indonesia, UMKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UMKM setiap tahunnya. Tujuan paling utama bagi sebuah usaha adalah mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin, begitu juga bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mereka memiliki tujuan tertentu selain mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut yaitu dapat mengurangi tingkat pengangguran tenaga kerja di Indonesia (Suhairi, 2006).

Peran lain dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu memberi kontribusi bagi kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia. Menurut Firmanzah, Staf Khusus Presiden (SKP) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kontribusi UKM terhadap PDB Indonesia pada tahun 2012 yakni sebesar 59 persen, sedangkan usaha besar hanya mencapai 41 persen. PDB (Produk Domestik Bruto) dari sektor UMKM di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 4.869.568 milyar. PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan 6.23 persen dibandingkan dengan tahun 2011 (Senoaji, 2009).

Banyak hambatan atau masalah yang menyebabkan UMKM kurang berkembang. Hambatan atau masalah tersebut meliputi pemasaran produk, teknologi, permodalan, kualitas sumber daya manusia, persaingan usaha yang ketat, kurang teknis produksi dan keahlian dan masalah manajemen termasuk cara pengelolaan keuangan dan akuntansi. Pengelolaan keuangan dan akuntansi menjadi masalah utama UMKM. Hal ini sering diabaikan oleh pemilik UMKM, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah akuntansi yang benar (Martani, 2012:12).

Kendala pembuatan laporan keuangan oleh pemilik UMKM yaitu mereka tidak mengerti kalau ada standar akuntansi yang mengaturnya, sehingga mereka tidak menerapkan standar tersebut dalam proses pembuatan laporan keuangan usahanya. Disamping itu, SDM mereka kurang, mereka hanya menggunakan model tradisional atau konvensional berupa pencatatan sederhana. Sebetulnya model pencatatan sederhana sudah baik digunakan, akan tetapi kurang signifikan.

Pembuatan laporan keuangan UMKM sebaiknya menggunakan metode khusus yaitu SAK ETAP agar memperoleh hasil yang signifikan.

Penerapan penyusunan laporan keuangan terdiri dari berbagai macam prosedur-prosedur yang mengatur tentang berbagai langkah yang harus dilaksanakan agar suatu perusahaan dapat berjalan efisien dan efektif. Semakin kompleks suatu kegiatan operasional perusahaan maka penyusunan laporan keuangan semakin penting untuk diterapkan. Hasil dari penyusunan laporan keuangan tersebut adalah berupa informasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan (Suhairi, 2006).

Selain itu, laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur bagi pemilik UMKM dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap keputusan yang diambil oleh pemilik UMKM dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap, bukan hanya didasarkan pada laba semata (Herry, 2014:6).

Pada saat ini pemerintah Indonesia sudah mengatur secara khusus kewajiban UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Peraturan tersebut dituangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK ETAP) yang sudah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada 31 Oktober 2009. Standar ini dikemas cukup ringkas jika dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Walaupun cukup ringkas, tidak banyak merubah prinsip-prinsip yang umumnya telah dilaksanakan saat ini. Kehadiran standar ini dapat menjadi acuan

yang lebih mudah bagi kalangan yang lebih luas untuk penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima secara umum.

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau lebih dikenal dengan (SAK ETAP) diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk UMKM dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP juga diharapkan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya (Ma'rifatul,2012).

Penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu tentang SAK ETAP terdapat beberapa perbedaan, antara lain: Tanugraha (2012) dalam penelitiannya tentang evaluasi penerapan SAK ETAP pada PT. Tunas Dwipa Matra (TDMN), didapatkan bahwa laporan keuangan PT Tunas Dwipa Marta sudah sesuai dengan SAK ETAP. Mulyani (2013) dalam penelitiannya pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjung Pinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjung Pinang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangannya tidak sesuai dengan SAK ETAP. Hapsari (2013) dalam penelitiannya pada CV. Sapta Putra Mekar, laporan keuangannya belum sesuai dengan SAK ETAP, karena CV. Sapta Putra Mekar hanya membuat laporan laba ruginya saja.

Berdasarkan observasi dan wawancara pada ketua Koperasi Wanita Sri Rejeki ibu Mu'anah, Koperasi ini sudah berdiri selama 7 tahun, Anggota koperasi berasal dari penduduk setempat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah anggota koperasi awal berdiri sebanyak 36 orang dan untuk

sekarang anggota koperasi berjumlah sebanyak 100 orang. Mereka berencana untuk memajukan koperasi demi bisa mengayomi anggota yang ada pada koperasi. Simpanan selama tahun 2013 sebesar Rp. 68.375.000, pada tahun 2014 Rp 101.015.000, apad tahun 2015 sebesar 117.565.000 dan pada tahun 2016 sebesar 142.530.000. Dengan simpanan yang terus meningkat mereka dituntut untuk membuat laporan keuangan pada setiap akhir periode, laporan keuangan menjadi salah satu komponen mutlak yang harus dimiliki oleh Koperasi seperti Koperasi Wanita Sri Rejeki, jika ingin mengembangkan usaha. Oleh karena memotivasi penulis untuk melakukan penelitian di Koperasi Wanita Sri Rejeki, dan untuk mengetahui apakah standar yang di pakai sudah sesuai dengan SAK ETAP.

Motivasi dari penelitian ini agar kedepannya UMKM yang saya pilih untuk tempat penelitian menerapkan laporan yang sesuai dengan SAK ETAP, dari latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK ETAP PADA UMKM (STUDY KASUS KOPERASI SRI REJEKI KOTA BLITAR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan pada Koperasi Wanita Sri Rejeki ?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam penerapan SAK ETAP pada Koperasi Wanita Sri Rejeki ?

1.3 Tujuan peneitian

1. Untuk mengetahui penerapan SAK ETAP penyajian laporan keuangan pada Koperasi Wanita Sri Rejeki.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam penerapan SAK ETAP pada Koperasi Wanita Sri Rejeki.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Memperkaya kajian akuntansi mengenai laporan keuangan yang baik yang dapat digunakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

1.4.2 Manfaat secara praktis

1. Bagi UMKM, dapat dijadikan acuan dalam penerapan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan agar semakin baik untuk perkembangan UMKM selanjutnya.
2. Bagi Peneliti, Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana cara menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini pada UMKM.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Mulyani (2013) judul penelitian Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjung Pinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjung Pinang, Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Koperasi Mandiri Jaya dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel tidak sesuai dengan SAK ETAP.

Senoaji (2014) judul penelitian Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyusunan laporan keuangan UKM di kabupaten Kudus (Studi Kasus UKM Padarunan jaya), Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan usaha kecil menengah di Indonesia tidak menguasai dan menerapkan sistem keuangan yang tidak memadai. Usaha kecil belum memiliki dan menerakan catatan akuntansi dengan ketat dan disiplin dengan pembukuan yang sistematis dan teratur.

Edi Siswono (2014) judul penelitian Penerapan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Bebas SAK ETAP (Studi Kasus di UKM Brebes Fried Chichken), Hasil penelitian menunjukkan Brebes Fried Chicken sebelumnya tidak pernah menyusun dan membuat laporan keuangan usaha yang dijalaninya tersebut. Dalam pembuatan laporan keuangan kendala-kendalanya antara lain kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu yang difokuskan untuk membuat laporan keuangan karena waktu yang ada lebih dimaksimalkan pada kegiatan operasi usaha. Pada UKM Brebes Fried Chicken persediaan perhari merupakan hal yang

paling berpengaruh terhadap laba, karena persediaan hari ini dihabiskan untuk hari ini.

Hapsari (2013) judul penelitian Implementasi laporan keuangan sesuai SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) pada CV. Saputra Mekar (SPM), Hasil penelitian menunjukkan pada pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh CV. SPM pada tahun 2012 belum sesuai, karena CV. SPM hanya membuat laporan keuangan yaitu, laporan laba rugi akan tetapi pada proses penyusunan laporan laba rugi perusahaan tidak memasukkan harga pokok penjualan (HPP).

Tanugraha (2012) judul penelitian Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada PT. Tunas Dwipa Matra (TMDN), Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan pada PT TMDN sudah memadai karena pelaporannya sudah sesuai dengan SAK ETAP. Sejak tahun 2010, laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, materialitas, dapat diandalkan, memiliki substansi dan realitas, memiliki pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, dan sesuai dengan SAK ETAP.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti	Metode	Kelemahan	Hasil
1	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjung Pinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjung Pinang, Mulyani (2013).	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.		Menunjukkan bahwa laporan keuangan Koperasi Mandiri Jaya dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel tidak sesuai dengan SAK ETAP.
2	Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyusunan laporan keuangan UKM di kabupaten Kudus (Studi Kasus UKM Padarunan Jaya). Senoaji, 2014	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Data yang dimasukkan dalam skripsi kurang lengkap sehingga pembaca kurang bisa memahami kondisi keuangan yang ada di lapangan.	menunjukkan bahwa kelemahan usaha kecil menengah di Indonesia tidak menguasai dan menerapkan sistem keuangan yang tidak memadai. Usaha kecil belum memiliki dan menerapkan catatan akuntansi dengan ketat dan disiplin dengan pembukuan yang sistematis dan teratur.

3	<p>Penerapan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Bebasis SAK ETAP (Studi Kasus di UKM Brebes Fried Chichken). Adi Siswono,2014</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini termasuk studi lapangan, sehingga banyak didapat hasil dari jawaban kuesioner yang tidak sesuai dengan penulis inginkan. Penelitian ini juga termasuk penelitian kuantitatif sehingga hasil yang didapat tentunya tidak akan sesuai dengan kondisi di lapangan karena dihitung dengan model statistik.</p>	<p>Menunjukkan Brebes Fried Chicken sebelumnya tidak pernah menyusun dan membuat laporan keuangan usaha yang dijalaninya tersebut. Dalam pembuatan laporan keuangan kendala-kendalanya antara lain kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu yang difokuskan untuk membuat laporan keuangan karena waktu yang ada lebih dimaksimalkan pada kegiatan operasi usaha. Pada UKM Brebes Fried Chicken persediaan perhari merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap laba, karena persediaan hari ini dihabiskan untuk hari ini.</p>
4	<p>Implementasi Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP pada CV. Sapta Putra Mekar. Hapsari (2013)</p>	<p>Metode yang digunakan adalah kualitatif.</p>	<p>Pencatatan transaksi yang dilakukan UKM kurang lengkap sehingga menyulikan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan pada pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh CV.</p>

			peneliti buat melakukan penyusunan laporan keuangan.	Sapta Putra Mekar pada tahun 2013 belum sesuai, karena CV. Sapta Putra Mekar hanya membuat laporan keuangan yaitu, laporan laba rugi akan tetapi pada proses penyusunan laporan laba rugi perusahaan tidak memasukkan harga pokok penjualan (HPP.)
5	Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada PT. Tunas Dwipa Matra. Tanugraha (2012)	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Peneliti hanya mengavakuasi laporan keuangan, bukan menerapkan.	Hasil penelitian ini menunjukkan laporan keuangan pada PT Tunas Dwipa Matra sudah memadai karena pelaporannya sudah sesuai dengan SAK ETAP. Sejak tahun 2010, laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, materialitas, dapat diandalkan, memiliki substansi dan realitas, memiliki pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, dan sesuai dengan SAK ETAP.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama melakukan penelitian pada UKM. Sedangkan perbedaannya, 1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 2. Lokasi penelitiannya.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Akuntansi

2.2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai (Martani, 2012)

Akuntansi (*accountancy*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Kedua, *auditing* ialah pengetahuan yang menyangkut pemeriksaan dan penilaian (evaluasi) atas hasil proses pelaksanaan pembukuan tersebut. Oleh karena itu, istilah akuntansi (*accountancy*) lebih luas meliputi baik bidang teori, proses pembukuan, penerapan atau praktek, maupun pemeriksaan dan penilaian. Sementara itu istilah *accounting* hanya menunjukkan bidang teori (Reeve & Warren, 2011)

Akuntansi merupakan proses pengumpulan, pengidentifikasian, dan pencatatan serta pengikhtisaran dari data keuangan serta melaporkannya kepada pihak yang menggunakannya, kemudian menafsirkan guna pengambilan keputusan ekonomi (Harahap, 2013)

Perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat telah menyebabkan semakin kompleksnya bahasa tersebut, yang digunakan untuk mencatat,

meringkas, melaporkan, menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, perusahaan, pemerintah dan anggota masyarakat lainnya.

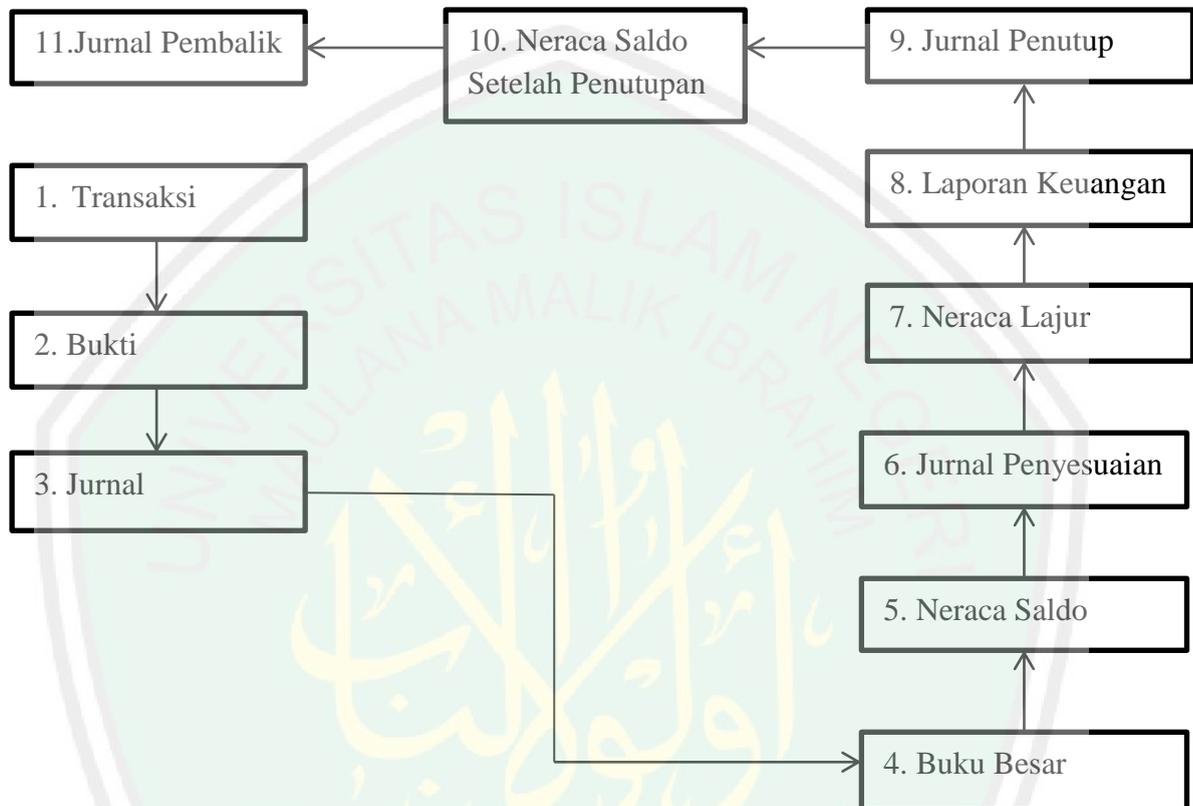
Beberapa definisi akuntansi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, definisi dari akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi atas transaksi- transaksi dan kejadiankejadian dalam perusahaan yang kegiatannya dapat diukur dengan satuan mata uang untuk membuat pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh pihak- pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (*Bussines Stakeholder*).

2.2.1.2 Siklus Akuntansi

Pengertian siklus akuntansi juga diungkapkan Fanny (2012) siklus akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan penyajian laporan mengenai transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu.

Menurut Kieso (2011) yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah prosedur akuntansi yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan. Digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi



Sumber : Kieso (2011)

1. Tahap pengidentifikasian

Tahap pengidentifikasian adalah cara mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pengidentifikasian bukti transaksi juga merupakan langkah awal dari perancangan jurnal. Langkah-langkah pengidentifikasian menurut (Shiro:2015)

- a. Mengidentifikasi karakteristik transaksi
- b. Membuat jurnal standar
- c. Merancang jurnal berdasarkan jurnal standar

Adapun tahapan pengidentifikasian transaksi ke dalam jurnal meliputi (Shiro:2015)

- a. Mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya
- b. Menentukan masing-masing akun yang di pengaruhi oleh transaksi tersebut dan klarifikasi berdasarkan jenisnya
- c. Menetapkan apakah akun-akun tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi yang ada
- d. Menetapkan apakah transaksi tersebut harus didebit atau di dikredit akunnnya
- e. Memasukkan transaksi kedalam buku jurnal

Fungsi dari tahap pengidentifikasian adalah untuk mengidentifikasi transaksi dari bukti transaksi yang ada. Dalam hal ini Koperasi Wanita Sri Rejeki telah melakukan pengidentifikasian tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang ada sebagaimana dijelaskan.

2. Tahap pencatatan

Menurut Andang (2013) Siklus akuntansi dimulai dari adanya suatu transaksi dan kejadian yang harus dicatat. Transaksi adalah tindakan yang mengakibatkan perubahan harta, utang, dan modal yang berhubungan dengan pihak luar. Tahap pencatatan antara lain :

- a. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi
- b. Pencatatan dalam jurnal
- c. Pemindahbukuan ke buku besar

Buku jurnal semua transaksi dicatat sehingga dari buku jurnal kita dapat mengetahui semua transaksi yang terjadi didalam perusahaan. Buku jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menampung penjelasan-penjelasan yang menyertai transaksi tersebut karena buku jurnal merupakan sumber pencatatan transaksi. Setelah jurnal dibuat maka langkah selanjutnya adalah mempostingnya kedalam buku besar.

3. Tahap Pengikhtisaran (*Summarizing*)

Menurut Suharli (2006) tahapan pengikhtisaran antara lain:

- a. Jurnal Penyesuaian
- b. Jurnal Pembalik
- c. Neraca Lajur

Jurnal Penyesuaian menurut Soemarso (2004) perlu dibuat agar akun-akun yang ada mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, beban, pendapatan, dan modal yang sebenarnya.

Menurut Andang (2013) dalam siklus akuntansi, setelah dilakukan penutupan buku besar serta membuat neraca saldo setelah penutupan, saat awal tahun pada periode akuntansi selanjutnya. Sebelum memulai pencatatan suatu transaksi pada periode akuntansi yang baru / tahun buku baru terkadang perusahaan butuh untuk menyesuaikan lagi rekening akun-akun yang sudah dibuat jurnal penyesuaian. Dan ayat jurnal yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut adalah " **Jurnal Pembalik** ".

Tanda-tanda suatu akun jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik adalah apabila suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun riil yang baru

atau belum terlihat di neraca saldo. Beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik :

- a) Beban yang masih harus dibayar
- b) Beban yang dibayar di muka (jika tercatat sebagai beban)
- c) Pendapatan yang masih akan diterima
- d) Pendapatan yang diterima di muka (jika tercatat sebagai pendapatan)
- e) Pemakaian atas Perlengkapan (bila tercatat sebagai beban)

Menurut martani (2012) Neraca lajur merupakan alat bantu untuk menyusun laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan neraca. Neraca lajur adalah kertas yang digunakan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur bermanfaat untuk memahami arus data akuntansi dari neraca saldo yang belum disesuaikan ke laporan keuangan, neraca saldo terdiri dari 10 kolom, yaitu: neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, neraca masing-masing terdiri dari sisi debit kredit. Neraca lajur disusun dengan memindahkan data-data neraca saldo dan jurnal penyesuaian.

2.2.2 Laporan Keuangan

2.2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Martani (2012) laporan keuangan merupakan informasi bagi penggunanya, terutama pemilik perusahaan investor, kreditur, dan juga manajemen untuk mengambil keputusan – keputusan terkait perusahaan di masa mendatang, seperti:

- a) Kelayakan untuk menambah investasi kedalam perusahaan atau sebaliknya penentuan apakah harus melakukan penarikan investasi.
- b) Kelayakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan

Menurut Kieso (2011) Laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas serta laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham.

Kewajiban bagi perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Dalam pengertian yang sederhana menurut Kasmir (2012), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan tertulis yang menyajikan dan memberi informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.2.2.2 Tujuan laporan keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut IAI dalam PSAK (2009) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi yang meliputi:

1. Aset
2. Liabilitas (kewajiban)
3. Ekuitas
4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
5. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
6. Arus kas

Kasmir (2012) menjelaskan beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- 1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan – perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode

- 7) Memberikan informasi tentang catatan – catatan atas laporan keuangan.
- 8) Informasi keuangan lainnya.

2.2.2.3 Pihak-pihak yang memerlukan laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2012) ada 5 pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang meliputi pemilik, manajemen, kreditor, pemerintah, dan investor.

1) Pemilik

Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah :

- a) Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b) Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode.
- c) Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.

2) Manajemen

Laporan keuangan bagi pihak manajemen yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen.

- a) Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- b) Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.

- c) Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
- d) Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3) Kreditor

Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut.

- a) Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.
- b) Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.
- c) Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya.

4) Pemerintah

Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah :

- a) Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- b) Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara secara jujur dan adil.

5) Investor

Laporan Keuangan bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (deviden) serta perkembangan nilai saham kedepan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak.

2.2.3 Aset

Menurut SAK ETAP (2009) paragraf 15.1 Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

2.2.3.1 Pengakuan Aset

Menurut SAK ETAP (2009) paragraf 15.4 entitas harus Entitas harus menerapkan kriteria pengakuan dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu, entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika:

- a. Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2.2.3.2 Pengukuran Aset

SAK ETAP (2009) paragraf 15.10 mengatakan pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- a. harga beli, termasuk termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut

diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

2.2.3.3 Pengungkapan Aset

Menurut SAK ETAP (2009) paragraf 15.31 entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap:

- a. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto.
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan
 - 2) Pelepasan
 - 3) Kerugian penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan dalam laporan laba rugi sesuai dengan Penurunan Nilai Aset.
 - 4) Penyusutan
 - 5) Perubahan lainnya.

Entitas juga harus mengungkapkan:

- a. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang.
- b. Jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap.

2.2.4 Kewajiban

2.2.4.1 Pengakuan Kewajiban Diestimasi

Menurut SAK ETAP (2009) paragraf 18.4 entitas mengakui kewajiban diestimasi jika:

- a. Entitas memiliki kewajiban kini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu
- b. Kemungkinan (lebih mungkin dibandingkan tidak mungkin) terjadi bahwa entitas akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyelesaian.
- c. Jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal

2.2.4.2 Pengukuran Kewajiban Diestimasi

Menurut SAK ETAP (2009) paragraf 18.8 Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah kewajiban diestimasi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang. Risiko tertentu atas kewajiban dicerminkan di tingkat diskonto atau estimasi jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban, tetapi bukan keduanya. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan.

- a. Jika kewajiban diestimasi yang sedang diukur menyangkut populasi yang terdiri atas sejumlah besar unsur, maka kewajiban ditentukan dengan menimbang berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas terkait.

- b. Jika kewajiban yang diukur hanya satu, maka kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi merupakan estimasi terbaik dari kewajiban tersebut.

2.2.4.3 Pengungkapan Kewajiban Diestimasi

SAK ETAP (2009) paragraf 18.14 menyatakan untuk setiap jenis kewajiban diestimasi, entitas harus mengungkapkan:

- a. Jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
- b. Kewajiban diestimasi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada kewajiban diestimasi yang ada.
- c. Jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada kewajiban diestimasi selama periode bersangkutan.
- d. Jumlah yang belum digunakan selama periode bersangkutan
- e. Peningkatan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto selama periode yang bersangkutan.
- f. Uraian singkat mengenai sifat kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi.
- g. Indikasi adanya ketidakpastian atas jumlah dan saat arus pengeluaran kas
- h. Jumlah ekspektasi penggantian, dengan menyebutkan aset yang telah diakui atas ekspektasi penggantian tersebut.

2.2.5 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

2.2.5.1 Sejarah Singkat SAK ETAP

Ikatan Akuntansi Indonesia sejak Juli 2009 telah meluncurkan standar akuntansi ETAP (SAK-ETAP). Nama standar ini sedikit unik karena exposure draftnya diberi nama Standar Akuntansi UKM (Usaha Kecil dan Menengah), namun mengingat definisi UKM sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan, standar ini diberi nama SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Wahyuni, 2012).

Sesuai dengan namanya maka sasaran pengguna dari standar ini adalah entitas yang tidak memiliki tanggungjawab akuntabilitas kepada publik (ETAP). SAK ETAP beranalogi dengan IFRS SMEs (Small and Medium Enterprises), bahkan semangat pengembangan SAK ETAP berasal dari IFRS SMEs namun dengan beberapa penyesuaian.

Adanya SAK ETAP, maka perusahaan kecil seperti UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan SAK Umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan SAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Selama ini perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik mengalami dilema dalam penyusunan laporan keuangan. Mereka menginginkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, untuk tujuan-tujuan antara lain memperoleh kredit dari bank, tujuan pelaporan pajak maupun

tujuan internal perusahaan. Namun, hambatan dalam pengaplikasian SAK Umum terkait kompleksitas SAK Umum sehingga menimbulkan biaya yang besar apabila diterapkan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) memahami hal ini dan memberikan solusi berupa penerbitan SAK ETAP yang merupakan simplifikasi dari SAK Umum. Secara substansi tidak terdapat perbedaan signifikan antara keduanya, namun persyaratan disclosure dari SAK ETAP berkurang signifikan dari SAK Umum (Eka, 2012)

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK ETAP.

Selanjutnya ketentuan transisi juga menjelaskan bahwa entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK-ETAP pada tahun 2011, namun kemudian mendaftar menjadi perusahaan publik pada tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib

menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali. Sebaliknya entitas yang sebelumnya menggunakan SAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan (Wahyuni, 2012).

2.2.5.2 Ruang Lingkup SAK ETAP

Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal; atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat

menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut.

2.2.5.3 Penyusunan laporan keuangan SAK ETAP

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi:

a. Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang usaha dan piutang lainnya
- 3) Persediaan
- 4) Properti dan investasi
- 5) Aset tetap
- 6) Aset tidak berwujud
- 7) Utang usaha dan utang lainnya
- 8) Aset dan kewajiban pajak
- 9) Kewajiban diestimasi
- 10) Ekuitas

b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban.

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) Beban keuangan
- 3) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- 4) Beban pajak
- 5) Laba atau rugi neto

c. Laporan perubahan ekuitas

Dalam laporan ini menunjukkan:

- 1) Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.
- 2) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam laporan arus kas terdapat dua metode, yaitu :

1) Metode Langsung

Pada dasarnya metode ini adalah laporan arus kas yang disusun berdasarkan pada buku kas/bank. Dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap (*gross*) dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Keunggulan utama dari metode langsung ini adalah bahwa metode ini melaporkan sumber dan penggunaan kas dalam laporan arus kas. Kelemahan utamanya adalah bahwa data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah di dapat dan biaya pengumpulannya umumnya mahal. Metode Langsung menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasi. Metode langsung lebih mudah untuk dimengerti, dan memberikan informasi yang lebih banyak untuk mengambil keputusan.

2) Metode Tidak Langsung

Berbeda dengan metode penyusunan langsung dimana laporan arus kas disusun berdasarkan pada buku kas/bank, metode penyusunan laporan arus kas secara tidak langsung disusun berdasarkan pada laporan laba-rugi dan neraca. Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Keunggulan dalam metode ini adalah memusatkan pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Dalam hal ini, metode tersebut menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas. Karena datanya dapat tersedia dengan segera, maka metode ini lebih murah dibandingkan dengan metode langsung. Penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode ini diawali dengan laba bersih dan menyesuaikan laba bersih tersebut sehingga diperoleh arus kas dari aktivitas operasi.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus:

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu
- 2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan
- 3) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.2.6 Koperasi

2.2.6.1 Pengertian Koperasi

koperasi secara sederhana berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" (Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah : suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. (Herujianto,2002).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat

(1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja se efisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Menurut Departemen Kementrian Koperasi, Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal Revolusi Industrial di Eropa pada akhir abad 18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-Industri. Koperasi Modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang berisi kumpulan orang – orang yang memiliki tujuan sama, berasas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2.6.2 Sejarah Koperasi

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat,

ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. (Herujianto, 2002).

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan berkoperasi.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging*, dan pada tahun 1927 *Regeling Inlandsche Cooperatieve*.

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi *kumiyai*. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda).

2.2.6.3 Simpan Pinjam

Menurut Ninik Widiyanti (2003): “Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”.

Koperasi Simpan Pinjam melindungi anggotanya dari rentenir dan pemerintah berusaha memperbesar usaha koperasi dengan memberikan pinjaman

modal kepada koperasi, sehingga anggota koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan bunga-bunga yang ringan. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam membimbing anggotanya dalam mempergunakan uang yang mereka pinjam, mereka didik untuk mengatur keuangan anggota agar bermanfaat dan mendidik anggota agar menggunakan modal dengan sebaik-baiknya.

2.2.7 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.7.1 Pengertian UMKM

Dalam UU no. 20/2008, yang dimaksud usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang, yaitu :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur Undang-Undang, yaitu :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang (Rahmana, 2015).

Menurut Kementrian Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

2.2.7.2 Karakteristik Usaha Kecil

1. Jenis barang yang diperdagangkan umumnya tetap dan tidak berubah.
2. Lokasi tempat usaha umumnya menetap dan tidak berpindah-pindah.
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
4. Sudah memiliki izin usaha dan legalitas persyaratan lainnya termasuk NPWP.
5. SDM (pengusaha) sudah berpengalaman dalam berwirausaha.
6. Sebagian sudah akses ke perbankan untuk keperluan modal.
7. Belum dapat membuat manajemen usaha yang baik seperti bussiness plan.

2.2.7.3 Karakteristik usaha menengah

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
2. Melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk perbankan.
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada pemeliharaan kesehatan karyawannya.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan
5. Sudah akses ke sumber pendanaan perbankan.

6. Memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik untuk proses produksi sehingga dapat memajukan usahanya.

2.2.7.4 Pengenaan Tarif Pajak UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini termasuk dalam yang menyederhanakan peraturan perpajakan bagu usaha kecil menengah. PPh ini masuk ke PPh Pasal 4 ayat 2, bersifat final. Maskud pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan dalam membuat peraturan ini memiliki maksud sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku UMKM masih belum mengerti akuntansi atau pembuatan laporan keuangan yang standard.
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi. Pajak merupakan kewajiban warga negara sehingga peraturan ini diharapkan mendorong masyarakat mematuhi peraturan perpajakan.
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi. Peraturan ini mendorong masyarakat untuk jujur melaporkan usahanya kepada petugas pajak
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah untuk membangun Indonesia.

Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam 1 Tahun Pajak. Berdasarkan keterangan yang

diungkap oleh DJP Kemenkeu, usaha tersebut meliputi usaha dagang, industri, dan jasa. Akan tetapi tarif 1% omzet ini tidak untuk para pelaku profesional atau penghasilan dari sehubungan dengan pekerjaan bebas.

2.8 Integrasi Keislaman

Dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 282 telah menganjurkan melakukan pencatatan bila melakukan transaksi ekonomi, adanya pencatatan dapat dijadikan alat bukti, menggunakan saksi (untuk transaksi-transaksi yang material) sangat diperlukan karena dikhawatirkan pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat, dan tentu saja adanya sistem pelaporan yang konprehensif akan memantapkan manajemen karena semua transaksi dapat dikelola (dikendalikan) dengan baik sehingga terhindar dari kebocoran-kebocoran.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an (2:282) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فليُمْلِئْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

A. Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah: 282

Pada waktu Rosulullah SAW datang kemadinah pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Oleh sebab itu rosul bersabda: *”Barang siapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangkawaktu yang tertentu pula”*sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat 282 sebagai perintah apabila mereka utang piutang maupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. (Mahali,1989).

B. Penafsiran QS. Al-Baqarah: 282 Menurut Tafsir Jalalayn

(Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain (secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan (untuk waktu yang ditentukan) atau diketahui, (maka hendaklah kamu catat) untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. (Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya.

(Janganlah merasa enggan) atau berkeberatan (penulis itu) untuk (menuliskannya) jika ia diminta, (sebagaimana telah diajarkan Allah kepadanya), artinya telah diberi-Nya karunia pandai menulis, maka janganlah dia kikir menyumbangkannya. 'Kaf' di sini berkaitan dengan 'ya'ba' (Maka hendaklah dituliskannya) sebagai penguat.

(Hendaklah diimplakkan) surat itu (oleh orang yang berutang) karena dialah yang dipersaksikan, maka hendaklah diakuinya agar diketahuinya kewajibannya, (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam mengimplakkan itu (dan janganlah dikurangi darinya), maksudnya dari utangnya itu (sedikit pun juga dan sekiranya orang yang berutang itu bodoh) atau boros (atau lemah keadaannya) untuk mengimplakkan disebabkan terlalu muda atau terlalu tua (atau ia sendiri tidak mampu untuk mengimplakkannya) disebabkan bisu atau tidak menguasai bahasa dan sebagainya, (maka hendaklah diimplakkan oleh

walinya), misalnya bapak, orang yang diberi amanat, yang mengasuh atau penerjemahnya.

(Jujur dan hendaklah persaksikan) utang itu kepada (dua orang saksi di antara laki-lakimu) artinya dua orang Islam yang telah balig lagi merdeka (Jika keduanya mereka itu bukan), yakni kedua saksi itu (dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan) boleh menjadi saksi (di antara saksi-saksi yang kamu sukai) disebabkan agama dan kejujurannya. Saksi-saksi wanita jadi berganda ialah (supaya jika yang seorang lupa) akan kesaksian disebabkan kurangnya akal dan lemahnya ingatan mereka, (maka yang lain (yang ingat) akan mengingatkan kawannya), yakni yang lupa. Ada yang membaca 'tudzkir' dan ada yang dengan tasydid 'tudzakir'. Jumlah dari idzkar menempati kedudukan sebagai illat, artinya untuk mengingatkannya jika ia lupa atau berada di ambang kelupaan, karena itulah yang menjadi sebabnya. Menurut satu qiraat 'in' syarthiyah dengan baris di bawah, sementara 'tudzakiru' dengan baris di depan sebagai jawabannya.

(Janganlah saksi-saksi itu enggan jika) 'ma' sebagai tambahan (mereka dipanggil) untuk memikul dan memberikan kesaksian (dan janganlah kamu jemu) atau bosan (untuk menuliskannya), artinya utang-utang yang kamu saksikan, karena memang banyak orang yang merasa jemu atau bosan (biar kecil atau besar) sedikit atau banyak (sampai waktunya), artinya sampai batas waktu membayarnya, menjadi 'hal' dari dhamir yang terdapat pada 'taktubuh' (Demikian itu) maksudnya surat-surat tersebut (lebih adil di sisi Allah dan lebih mengokohkan persaksian), artinya lebih menolong meluruskannya, karena adanya bukti yang

mengingatkannya (dan lebih dekat), artinya lebih kecil kemungkinan (untuk tidak menimbulkan keraguanmu), yakni mengenai besarnya utang atau jatuh temponya.

(Kecuali jika) terjadi muamalah itu (berupa perdagangan tunai) menurut satu qiraat dengan baris di atas hingga menjadi khabar dari 'takuuna' sedangkan isimnya adalah kata ganti at-tijaarah (yang kamu jalankan di antara kamu), artinya yang kamu pegang dan tidak mempunyai waktu berjangka, (maka tidak ada dosa lagi kamu jika kamu tidak menulisnya), artinya barang yang diperdagangkan itu (hanya persaksikanlah jika kamu berjual beli) karena demikian itu lebih dapat menghindarkan percekocan. Maka soal ini dan yang sebelumnya merupakan soal sunnah.

(Janganlah penulis dan saksi maksudnya yang punya utang dan yang berutang menyulitkan atau mempersulit), misalnya dengan mengubah surat tadi atau tak hendak menjadi saksi atau menuliskannya, begitu pula orang yang punya utang, tidak boleh membebani si penulis dengan hal-hal yang tidak patut untuk ditulis atau dipersaksikan. (Dan jika kamu berbuat) apa yang dilarang itu, (maka sesungguhnya itu suatu kefasikan), artinya keluar dari taat yang sekali-kali tidak layak (bagi kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah) dalam perintah dan larangan-Nya (Allah mengajarimu) tentang kepentingan urusanmu. Lafal ini menjadi hal dari fi`il yang diperkirakan keberadaannya atau sebagai kalimat baru. (Dan Allah mengetahui segala sesuatu).

2.8.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut IAI dalam PSAK (2009) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi yang meliputi:

1. Aset
2. Liabilitas (kewajiban)
3. Ekuitas
4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
5. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
6. Arus kas

Kasmir (2012) menjelaskan beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- 1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan – perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- 7) Memberikan informasi tentang catatan – catatan atas laporan keuangan.
- 8) Informasi keuangan lainnya.

Munculnya peradaban Islam sejak Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah tadi. Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah:

- 1) Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya
- 2) Menjaga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba)

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability dan menjamin akurasinya.

Pentingnya keadilan ini dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an Surat An Nahl: 90 sebagai berikut:

QS An-Nahl : 90

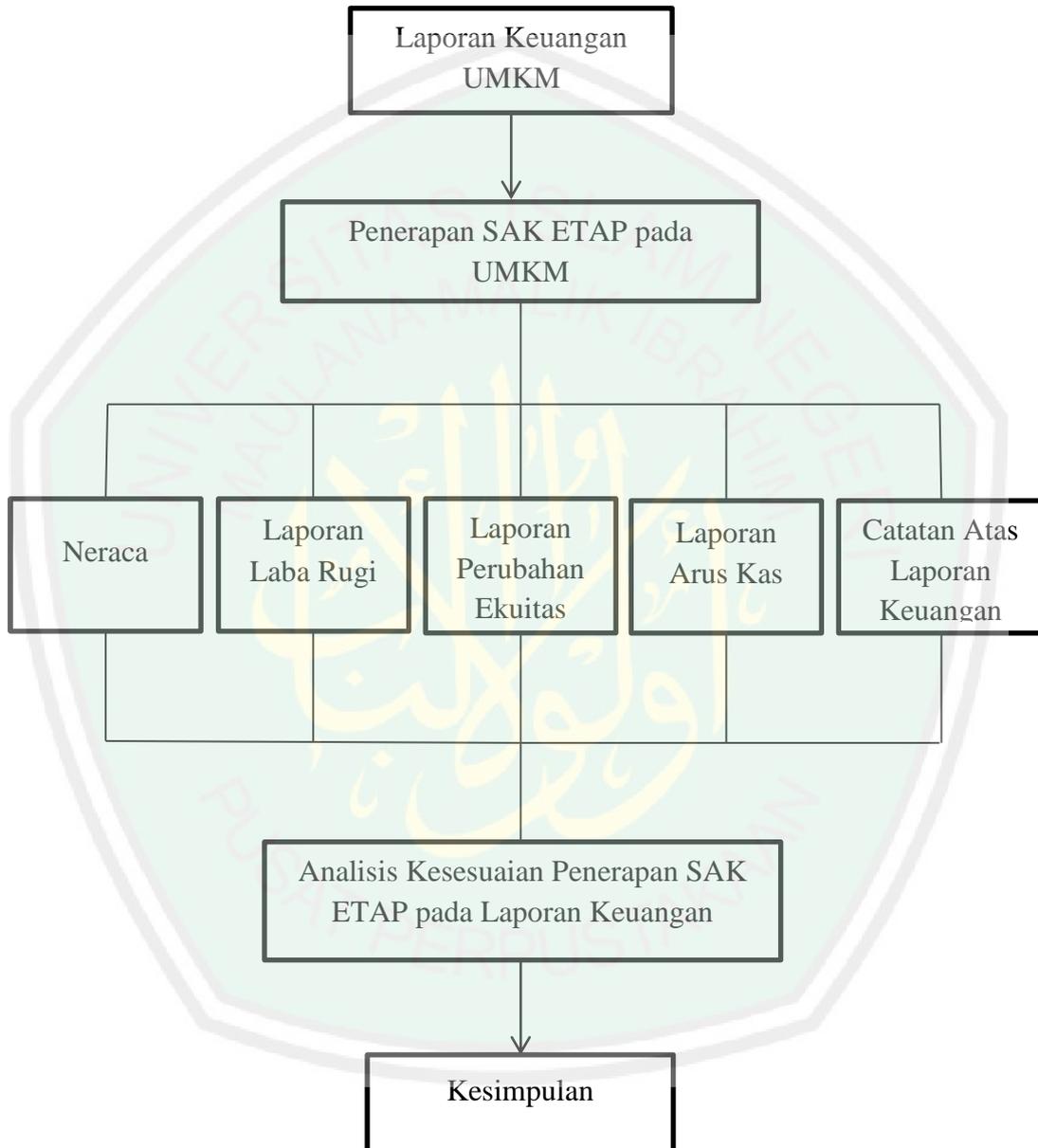
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengomentari dan mengupas transaksi kontan dan tunai. Menurutnya, setiap transaksi dalam berniaga seharusnya di tulis secara baik dan benar. Sebab hal demikian dapat menjadi informasi penting dalam melakukan aktivitas niaga pada masa-masa niaga yang akan datang. Dengan melakukan tulisan terhadap semua transaksi, peminjaman ataupun penjualan akan lebih mudah mempertanggungjawabkan niaganya. Secara umum dapat dirumuskan prinsip umum akuntansi syari’ah adalah keadilan dan pertanggungjawaban (Muhammad, 2005).

2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha memberikan gambaran mengenai data berdasarkan fakta-fakta yang didapat peneliti, proses penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang di dapat peneliti, proses penelitian yang dilakukan melalui pengukuran dengan alat yang baku, menguraikan karakteristik tentang keadaan dan sifat-sifat yang sebenarnya dari objek penelitian (Patilima; 2007). Menurut Moleong (2012), analisis deskriptif adalah mendeskripsikan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, kemudian menganalisis dengan teori yang ada. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan bagaimana UMKM menyajikan laporan keuangannya, diikuti dengan implementasi penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini saya lakukan di Koperasi Wanita Sri Rejeki alamat koperasinya berada di jalan Tidore gang I No.61 Rt.02/Rw. 04 Kelurahan Klampok Kecamatan Sanan Wetan Kota Blitar.

3.3 Jenis dan sumber data

Pengumpulan data yang direncanakan dan dilaksanakan secara cermat akan sangat membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi

penelitian (Sujoko 2013). Data tersebut digunakan untuk menganalisa, dan mengevaluasi data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan. Data di peroleh secara langsung dari obyek UMKM dengan teknik-teknik sebagai berikut.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya agar menemukan solusi atau masalah yang diteliti (Sekaran, 2006:326). Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi maupun wawancara langsung kepada pemilik perusahaan.

1. Melakukan observasi langsung ke tempat penelitian, yaitu di koperasi wanita sri rejeki di kota Blitar.
2. Melakukan wawancara kepada ibu mu'anah selaku ketua koperasi dan ibu siti putikah selaku bendahara.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat dari instansi terkait maupun oleh pihak lain (Sekaran, 2006:326). Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan laporan keuangan sesuai SAK ETAP pada UMKM. Adapun data sekunder yang didapat dalam penelitian ini yaitu melalui buku RAT dari koperasi wanita sri rejeki.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu; observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik penelitian dengan cara mendatangi UMKM yang bersangkutan secara langsung dengan pihak terkait guna mendapat data primer dan informasi yang akurat.

2. Wawancara,

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan lisan secara langsung kepada pelaku usaha UMKM. Wawancara memegang peranan penting dalam mengumpulkan informasi untuk studi kasus karena wawancara memungkinkan peneliti untuk merekam opini, perasaan, dan emosi partisipan berkenaan dengan fenomena yang dipelajari.

3. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data, metode dokumentasi ini yaitu metode mencari data yang berasal dari catatan, dokumen, ataupun tulisan lain yang berkaitan dengan variabel penelitian kita. Dalam menggunakan metode ini, peneliti memegang checklist untuk mencari variabel yang sudah ditentukan.

3.5 Teknik Analisa Data

Sugiyono (2010:334) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis.

Pada pendekatan deskriptif sebagai bagian dari jenis penelitian kualitatif, dalam analisis data lebih banyak mendasarkan prosesnya bersamaan dengan penggalian atau pengumpulan data yang mana dilaksanakan dalam lapangan. Guna mengungkap atau mendeskriptifkan penerapan laporan keuangan sesuai SAK ETAP pada UMKM berikut proses-proses yang akan ditempuh berdasarkan Leksono (2013):

1. Data wawancara dan observasi dilapangan diolah menjadi informasi atau analisis-*analisis* deskripsi melalui pengkodean (*emic perspective*).
2. Penelaahan dan pengkajian informasi dalam lapangan (wawancara dan observasi) melalui perbandingan maupun pencocokan dengan informasi lain seperti dokumen-dokumen dan *co-informant* sebagai manifestasi modus penelitian induktif.
3. Pereduksian data melalui pengabaian data dan informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian dalam bentuk tabel.
4. Penyusunan narasi hasil pengolahan informasi dalam bentuk deskripsi dan bagan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data yang di peroleh:

- a. Melakukan observasi secara langsung ke koperasi wanita sri rejeki.
- b. Melakukan wawancara kepada ketua dan bendara koperasi wanita sri rejeki.
- c. Meminta data laporan keuangan yang di butuhkan.

- d. Melakukan analisis, apakah laporan yang di sajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi.
- e. Membandingkan laporan keuangan koperasi sri rejeki dengan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.
- f. Memberikan rekomendasi laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

Kesimpulan dari teknik analisis data ini yaitu data laporan keuangan dari koperasi wanita sri rejeki belum sesuai dengan SAK ETAP.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Wanita Sri Rejeki

Koperasi Wanita Sri Rejeki merupakan salah satu koperasi wanita yang ada di kota Blitar. Koperasi wanita sri rejeki berdiri pada tahun 2010. Awal mula berdirinya koperasi wanita sri rejeki dilatar belakangi oleh anggota PWRI untuk mendirikan koperasi wanita, Koperasi wanita sri rejeki diliat dari keanggotaan berkembang sangat pesat, awal berdiri Desember 2010 anggota berjumlah 33 orang, sampai akhir Desember 2016 sudah berkembang menjadi 100 orang. Untuk alamat koperasinya berada di jalan Tidore gang I No.61 Rt.02/Rw. 04 Kelurahan Klampok Kecamatan Sanan Wetan Kota Blitar. Koperasi wanita Sri Rejeki terus melakukan perbaikan dan inovasi-inovasi, Baik dari segi usaha maupun pelayanan.

Sejumlah strategi yang diterapkan bisa dikatakan sukses, terbukti dari semakin banyaknya anggota, serta banyaknya simpan pinjam di koperasi sri rejeki. Hingga saat ini usaha yang ada pada koperasi sri rejeki hanya ada simpan pinjam saja.

4.1.2 Visi dan Misi Koperasi Wanita Sri Rejeki

Visi :

- a. Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota

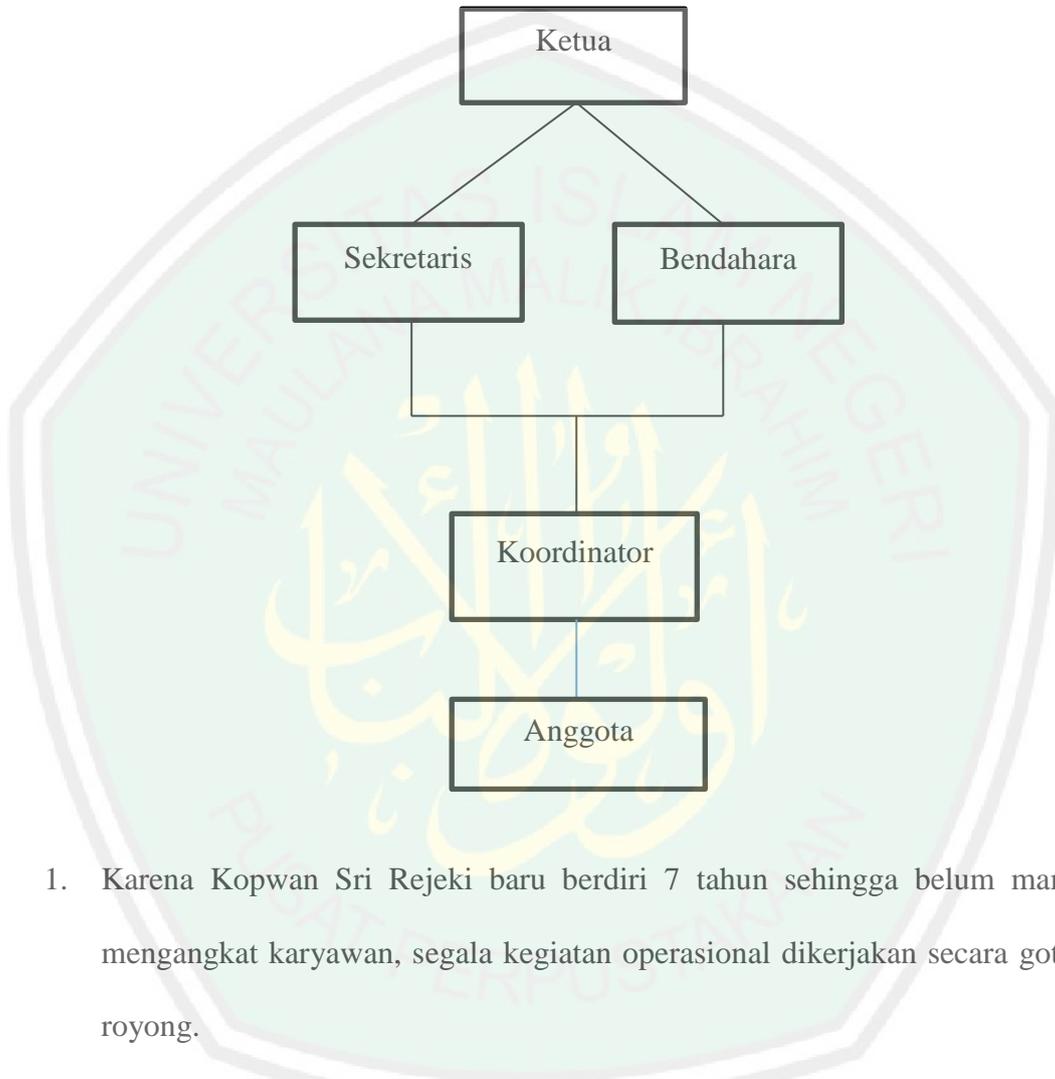
Misi :

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota
- b. Meningkatkan sumber daya manusia
- c. Mengembangkan budaya transparasi

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas, wewenang, dan tanggung jawab atas fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi dapat dilihat pembagian dan pendistribusian tugas dari setiap orang secara jelas. Sebuah perusahaan memiliki struktur organisasi yang menggambarkan interaksi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing bagian atau posisi yang diduduki oleh seorang karyawan. Struktur organisasi tersebut memuat alur perintah yang mengidentifikasi jabatan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing karyawan atas semua kegiatan kerja maupun komunikasinya dengan unit lain dalam lingkup perusahaan tersebut. Gambaran struktur organisasi Koperasi Wanita Sri Rejeki sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Koperasi Wanita Sri Rejeki



1. Karena Kopwan Sri Rejeki baru berdiri 7 tahun sehingga belum mampu mengangkat karyawan, segala kegiatan operasional dikerjakan secara gotong royong.
2. Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya telah berupaya menangani kegiatan Koperasi Sri Rejeki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Ketua

- a. Memimpin Koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota Pengurus.
- b. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan Keputusan Rapat anggota dan Rapat Pengurus.

Adapun wewenang dari ketua adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan Kebijakan dan mengambil keputusan.
- b. Menandatangani surat-surat dan perjanjian bersama Sekretaris dan Bendahara.

2. Sekretaris

- a. Bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran.
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi.
- c. Mengatur jalannya perkantoran.
- d. Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan.
- e. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas.
- f. Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi dan idiiil.

Adapun wewenang dari sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan.
- b. Menandatangani surat-surat bersama ketua.
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi dan penyuluhan.

3. Bendahara

- a. Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi.
- b. Mengatur jalannya pembukuan keuangan.
- c. Menyusun anggaran setiap bulan.
- d. Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang.
- e. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi.
- f. Menyusun laporan keuangan.
- g. Mengendalikan anggaran.

Adapun wewenang dari bendahara adalah sebagai berikut :

- a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha.
- b. Bersama dengan ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

4. Koordinator

Disamping rapat anggota dan pengurus, salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi adalah pengawas yang antara lain mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

Adanya fungsi pengawasan dalam suatu organisasi koperasi, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan-penyimpangan kebijakan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawas dipilih melalui rapat anggota bersama dengan pemilihan pengurus dengan masa jabatan tiga tahun. Jabatan pengawas tidak boleh dirangkap dengan jabatan pengurus, sedangkan persyaratan badan

pengawas sama dengan persyaratan pengurus. Dengan uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus menyangkut pengelolaan koperasi, baik yang menyangkut aspek organisasi idiil maupun aspek usaha.
 - b. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - c. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
5. Anggota
- a. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
 - b. Mengembangkan kebersamaan pada koperasi.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data Laporan Keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki

Sebagai salah satu koperasi yang cukup maju, banyak mendapat prestasi di Kota Blitar, Koperasi Wanita Sri Rejeki selalu melakukan pencatatan atas transaksi keuangan yang terjadi secara rutin. Koperasi Wanita Sri Rejeki juga telah membuat laporan keuangan yang dibutuhkan untuk melihat posisi keuangan dan sisa hasil usaha perusahaan selama periode tertentu. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh ibu Mu'anah selaku Ketua Koperasi Wanita Sri Rejeki saat wawancara pada hari jum'at 17 Januari 2016 pukul 15.00 :

“ Dalam koperasi ini kita mencatat transaksi keuangan secara rutin setiap bulannya dan dibukukan dalam bentuk laporan keuangan yang tertera laporan RAT setiap tahunnya, dan yang bertanggung jawab bertanggung jawab mencatat laporan adalah bendahara”.

Laporan keuangan disusun oleh orang bendahara yang bertanggung jawab untuk mencatat laporan keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki, laporan keuangan

ini digunakan untuk melihat posisi keuangan, jumlah kas masuk dan kas keluar, pengeluaran apa saja yang dilakukan dan mengontrol pengeluaran kas yang terjadi. Dalam SAK ETAP, laporan keuangan yang lengkap meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Sedangkan dalam laporan keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki, yang disajikan yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi atau di koperasi lebih dikenal dengan Laporan Perubahan Hasil Usaha (LPHU), Permodalan.

Menurut ibu Siti Putikah selaku bendahara Koperasi Wanita Sri Rejeki pada saat wawancara pada hari jum'at 17 Januari 2016 pukul 15.10 WIB menyatakan :

“ Proses pencatatan yang dilakukan oleh koperasi selama ini secara manual, belum menggunakan software akuntansi karena saya belum bisa membuat dan belum punya softwrenya, jadi dicatat manual saja pakai kalkulator. Komponen laporan keuangan yang disajikan selama ini yang sudah ada di RAT itu, yaitu neraca komparatif, perhitungan hasil usaha komparatif dan pembagian SHU tiap tahunnya. Dan untuk standar yang digunakan ya standart lama yang diberitahu oleh Dinas Koperasi kota Blitar dari awal dulu dan belum dirubah ke standart yang sekarang atau SAK ETAP ”.

Jika terdapat transaksi, peristiwa yang tidak diatur spesifik dalam SAK ETAP, maka manajemen dapat menggunakan *judgement*-nya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi agar menghasilkan informasi yang relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi dan andal yaitu dalam laporan keuangan yang :

- a. Menyajikan laporan keuangan dengan jujur terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas.
- b. Netral yaitu bebas dari bias
- c. Mencerminkan kehati-hatian
- d. Bersifat lengkap dalam semua hal yang material

Menurut ibu Mu'anah selaku Ketua Koperasi Wanita Sri Rejeki pada saat wawancara hari jum'at tanggal 17 Januari 2016 pukul 15.20 WIB menyatakan :

“ Kami membuat laporan keuangan untuk mengetahui untung atau ruginya perusahaan dan juga sebagai catatan sumber informasi keuangan Koperasi. Untuk tujuan informasi buat kami saja yang sudah ada saat ini lumayan cukup, tapi kadang kesulitan jika mau mengajukan persyaratan pinjaman ke bank, pemerintah atau donatur lainnya. Jika memang SAK ETAP ini adalah standart yang saat ini memang semestinya digunakan untuk mempermudah kalangan koperasi dan UKM, menurut saya hal yang sangat bagus sekali dan kamipun bersedia juga mengubah laporan keuangan kami nantinya supaya bisa berstandar SAK ETAP “.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Evaluasi laporan keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Mu'anah selaku Ketua Koperasi serta ibu Siti Putikah selaku Bendahara atau bagian yang membuat laporan keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki telah sesuai dengan laporan yang dibuat atau ditampilkan oleh Koperasi Wanita Sri Rejeki.

Namun terdapat ketidak sesuaian pada laporan keuangan yang disajikan Koperasi Wanita Sri Rejeki ditinjau berdasarkan SAK ETAP, yaitu sebagai berikut :

4.3.1.1 Penyajian Laporan Neraca

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) paragraf 4.1 mengatur informasi yang disajikan dalam laporan neraca dan bagaimana penyajiannya. Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu, akhir periode pelaporan.

Paragraf 4.2 neraca minimal Mencakup pos-pos berikut :

- 1) Kas dan setara kas.
- 2) Piutang usaha dan piutang lainnya.
- 3) Persediaan.
- 4) Properti investasi.
- 5) Aset tetap.
- 6) Aset tidak berwujud.
- 7) Utang usaha dan utang lainnya.
- 8) Asset dan kewajiban pajak.
- 9) Ekuitas.

Paragraf 4.5 entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca. Kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

Berikut ini laporan neraca yang disajikan oleh koperasi wanita sri rejeki :

Tabel 4.1
Neraca Koperasi Wanita Sri Rejeki

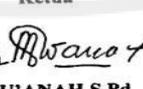
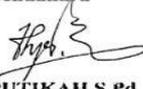

KOPERASI WANITA " SRI REJEKI "
Badan Hukum No.56/BH/XVI.30/422.104.1/2010 ,Tgl : 27 Desember 2010
Jl.Tidore Gang 1 No 61 (0342) 808218 Kelurahan Klampok Kota BLITAR

3.2.3.NERACA KOPERASI WANITA SRI REJEKI
PERIODE DESEMBER TH.2015 DAN DESEMBER TH. 2016

AKTIVA	Tahun 2015 (RP)	Tahun 2016 (RP)	PASIVA	Tahun 2015 (RP)	Tahun 2016 (RP)
Aktiva Lancar			Hutang Lancar		
- Kas	7.610.000,00	9.785.000,00	- Simpanan Manasuka	-	-
-Bank	150.000,00	150.000,00	- Dana Sosial	1.974.000,00	2.049.000,00
-Piutang S/P	132.800.000,00	156.720.000,00	- Dana Pendidikan	1.499.000,00	2.199.000,00
-			-	0,00	0,00
Jml Aktiva Lancar	140.560.000,00	166.655.000,00	Jml Hutang Lancar	3.473.000,00	4.248.000,00
Penyertaan	-	-	Hutang Jangka panjang	-	-
-			- Hutang	-	-
Jumlah penyertaan	-	-	-Hutang.....	-	-
Aktiva tetap	-	-	Jml Hutang Jangka Panjang	-	-
-Tanah	-	-	- Modal sendiri	-	-
-Bangunan	-	-	-Simpanan pokok	5.000.000,00	5.000.000,00
-Peralatan	-	-	-Simpanan wajib	68.210.000,00	87.530.000,00
-			-Donasi	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah Aktiva Tetap	-	-	-Cadangan Koperasi	13.877.000,00	19.877.000,00
JUMLAH AKTIVA	140.560.000,00	166.655.000,00	-Cadangan Resiko	-	-
			-SHU Tahun Berjalan	0,00	0,00
			Jumlah Modal sendiri	137.087.000,00	162.407.000,00
			JUMLAH PASIVA	140.560.000,00	166.655.000,00

Blitar, 31 Desember 2016
Pengurus Kopwan " Sri Rejeki "

Pengawas Ketua Bendahara

SUKANTI,SE **MU'ANAH,S.Pd** **SITI PUTIKAH,S.Pd**

Sumber : Koperasi Wanita Sri Rejeki Tahun 2016

Dalam neraca Koperasi Wanita Sri Rejeki tidak terdapat pos properti investasi, aset tidak berwujud, dan hutang pajak. Tidak adanya pos properti investasi, dikarenakan Koperasi Wanita Sri Rejeki tidak melakukan sewa gedung untuk unit-unit yang ada pada koperasi, melainkan menjalankan usahanya di rumah ibu mu'anah dan juga tidak memiliki aset tidak berwujud. Pos hutang pajak juga belum dicantumkan pada neraca Koperasi Wanita Sri Rejeki, sehingga belum mengurangi SHU tahun berjalan koperasi.

Sebenarnya neraca koperasi Wanita Sri Rejeki telah disajikan dengan cukup baik dan juga formatnya sudah mengarah pada standart SAK ETAP, namun tidak adanya pos hutang pajak bertentangan dengan standart SAK ETAP yang mewajibkan suatu entitas menyertakan pos hutang pajak pada neracanya.

Menurut ibu Siti Putikah selaku bendahara koperasi Wanita Sri Rejeki pada saat wawancara hari jum'at 17 Januari 2016 pukul 15.15 WIB menyatakan :

“ Tidak banyak masalah dalam proses pencatatan laporan keuangan yang sekarang, mungkin ada masalah jika salah catat atau salah hitung, tetapi jika ada yang lebih mudah dimengerti, apalagi berstandar dan yang memang seharusnya, kami bersedia belajar dan menggunakannya. Sebenarnya kami sudah pernah mendengar tentang SAK ETAP, tetapi kami belum menguasai dan menerapkannya. Dulu sempat pernah ada sosialisasi dan pelatihan mengenai SAK ETAP dari Dinas Koperasi Kota Blitar yang diikuti bendahara-bendahara koperasi tetapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya lagi, jadi kami belum menerapkannya karena memang belum memahami dan menguasai “.

Dari perincian ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki, maka berikut ini akan disajikan laporan keuangan neraca yang sudah diperbaiki dan disesuaikan dengan SAK ETAP :

Tabel 4.2
Neraca SAK ETAP

Koperasi wanita Sri Rejeki			
Neraca			
Per 31 Desember 2016			
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas	Rp. 9.785.000	Hutang Lancar	
Bank	Rp. 150.000	Simp.Manasuka	Rp. -
Piutang smpn pinjm	Rp. 156.720.000	Dana Sosial	Rp. 2.049.000
		Dana Pendidikan	Rp. 2.199.000
Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 166.655.000		
PENYERTAAN		Jumlah Kewajiban Lancar	Rp.34.408.956
Penyertaan	Rp. -	HUTANG JANGKA PANJANG	
Penyertaan	Rp. -	Hutang Non Bank	Rp. -
		Hutang Bank	Rp. -
Jumlah Penyertaan	Rp. -	Jmlh kewajiban jangka panjang	Rp. -
AKTIVA TETAP		MODAL SENDIRI	
Tanah	Rp. -	Simp. Pokok anggota	Rp. 5.000.000
Bangunan	Rp. -	Simp. Wajib anggota	Rp. 87.530.000
Peralatan	Rp. -	Donasi	Rp. 50.000.000
Jumlah aktiva tetap	Rp. -		
		Cadangan koperasi	Rp. 19.877.000

	Cadangan resiko	Rp. -
	SHU tahun berjalan	Rp. -
	Jmlah modal sendiri	Rp. 162.407.000
Rp.166.655.000		Rp. 166.655.000

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

4.3.1.2 Laporan Laba Rugi

Berikut ini laporan laba rugi yang disajikan oleh Koperasi Wanita Sri

Rejeki :

Tabel 4.3
Laporan Perhitungan Hasil Usaha

KOPERASI WANITA "SRI REJEKI"
Badan Hukum No.56/BH/XVI.30/422.104.1/2010, tgl 27 Desember 2010
Jl.Tidore I No 61 ☎ (0342) 808218Kelurahan Klampok Kota BLITAR

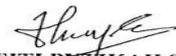
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA (RAPB)
KOPERASI WANITA SRI REJEKI TAHUN 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	
		REALISASI TAHUN 2016	RENCANA TAHUN 2017
I	PENDAPATAN		
	Pendapatan Jasa Pinjaman		34.800.000,00
	Pendapatan Administrasi	29.000.000,00	3.480.000,00
	Jumlah Pendapatan	31.900.000,00	38.280.000,00
II	BIAYA-BIAYA		
	1. Biaya Organisasi		
	Insentif Pengurus 1 th	1.860.000,00	2.000.000,00
	Insentif Pengawas 1 th	570.000,00	630.000,00
	Biaya Pelaksanaan RAT	1.850.000,00	1.950.000,00
	Transport Peserta/ undangan RAT	2.150.000,00	2.150.000,00
	Persediaan Doorprize RAT	625.000,00	725.000,00
	Biaya Rapat Pengurus dan Pengawas 1 th	750.000,00	850.000,00
	Biaya Peningkatan SDM / Diklat dan Rapat Keuar	925.000,00	1.250.000,00
	Biaya pertemuan dan arisan Forum Kopwan se kota	535.000,00	950.000,00
	Biaya Seragam pengurus & Pengawas	750.000,00	-
	Biaya penyusunan&pengiriman Laporan & Pajak 1 Th	600.000,00	600.000,00
	Jumlah Biaya Organisasi	10.615.000,00	11.105.000,00
	2. Biaya Administrasi		
	Biaya ATK rutin dan Foto Copy	215.000,00	550.000,00
	Biaya Pajak	290.000,00	350.000,00
	Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	-	-
	Biaya Pemeliharaan Kantor dan Pengadaan Infentaris	-	825.000,00
	Biaya Peringatan Hari Besar Nasional & Harkop	550.000,00	700.000,00
	Biaya Lembur Pengurus Harian	230.000,00	250.000,00
	Biaya Badan Hukum	-	-
	Jumlah Biaya Administrasi	1.285.000,00	2.675.000,00
	Total Biaya	11.900.000,00	13.780.000,00
	SISA HASIL USAHA/ SHU DARI JASA DAN ADMINISTRASI	20.000.000,00	24.500.000,00

Blitar, 18 Oktober 2016
Koperasi Wanita Sri Rejeki


SUKANTISE
Pengawas


MUANAHS.Pd
Ketua


SITI PUJIKAHS.Pd
Bendahara

Sumber : Koperasi Wanita Sri Rejeki Tahun 2016

Dalam laporan laba rugi Koperasi Wanita Sri Rejeki terdapat akun pendapatan serta akun beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pada pembagian kepada penanam modal. Komponen beban terletak di laporan laba rugi karena pengeluaran/biaya yang telah terpakai dan tidak dapat memberikan manfaat lagi dimasa yang akan datang. Penjelasan tersebut dapat menerangkan bahwa laporan laba rugi SAK ETAP komponen yang ada adalah beban. Hal tersebut telah sesuai dengan penyajian laporan keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki.

Namun penyajian laporan laba rugi koperasi Wanita Sri Rejeki tidak terdapat akun atau pos bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas dan juga beban pajak, yang dapat dilihat pada penyajian laporan laba rugi. Penyajian pos atau judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi, telah sesuai dengan SAK ETAP yang bertujuan untuk memahami kinerja keuangan. Koperasi juga tidak mencantumkan akun beban pajak dalam laporan laba rugi/laporan perhitungan hasil usahanya.

Sesuai dengan laporan laba rugi koperasi Wanita Sri Rejeki, di dalam SAK ETAP juga tidak menggunakan format laporan laba rugi komperhensif serta laporan ini menggunakan metode *single step* yang mencatat seluruh pendapatan terlebih dahulu kemudian dikurangi dengan seluruh beban.

Berikut ini rekomendasi Penyajian laporan laba rugi yang sesuai dengan SAK

ETAP :

Tabel 4.4
Laporan Laba Rugi sesuai SAK ETAP

KOPERASI WANITA "SRI REJEKI" LAPORAN LABA RUGI Per 31 Desember 2016	
PENDAPATAN	
1. Pendapatan unit simpan pinjam	
1.1 Pendapatan jasa pinjaman	Rp. 29.000.000
1.2 Pendapatan Administrasi	<u>Rp. 2.900.000</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 31.900.000
BIA YA-BIA YA	
1. Biaya Operasional	
1.1 Intensif pengurus 1 tahun	Rp. 1.860.000
1.2 Intensif pengawas 1 tahun	Rp. 570.000
1.3 Biaya Pelaksanaan RAT	Rp. 1.850.000
1.4 Transpot peserta/undangan RAT	Rp. 2.150.000
1.5 Pengadaan doorprice RAT	Rp. 625.000
1.6 Biaya rapat pengurus dan pengawas 1 tahun	Rp. 750.000
1.7 Biaya peningkatan SDM	Rp. 925.000
1.8 Biaya pertemuan forum kopwan	Rp. 535.000
1.9 Biaya seragam pengurus dan pengawas	Rp. 750.000
1.10 Biaya penyusunan laporan dan pengiriman	<u>Rp. 600.000</u>
Jumlah Biaya Organisasi	Rp. 10.615.000
2. Biaya Administrasi	

2.1 Biaya ATK dan Foto copy	Rp. 215.000
2.2 Biaya pajak	Rp. 290.000
2.3 Biaya lembur pengurus harian	Rp. 550.000
2.4 Biaya badan hukum	<u>Rp. 230.000</u>
Jumlah Biaya Administrasi	Rp. 1.285.000
Jumlah Beban	<u>(Rp. 11.900.000)</u>
SHU SETELAH PAJAK	Rp. 20.000.000

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

4.3.1.3 Laporan Arus Kas

Iakatan Akuntan Indonesia (2009) paragraf 7.1 mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Paragraf 7.2 Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

Paragraf 7.3 Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Namun Koperasi Wanita Sri Rejeki tidak membuat dan menyajikan Laporan Arus Kas pada pelaporan keuangannya. Dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP, dimana SAK ETAP mewajibkan suatu entitas untuk membuat Laporan Arus Kas pada suatu periode secara rutin dalam pelaporan keuangannya.

SAK ETAP menganjurkan laporan arus kas dibuat dengan metode tidak langsung. Koperasi Wanita Sri Rejeki belum membuat laporan arus kas dalam laporan keuangannya. Dalam kegiatan usahanya, Koperasi Wanita Sri rejeki tidak memiliki aktivitas investasi maupun pendanaan. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup usaha yang masih kecil. Berikut ini rekomendasi laporan arus kas sesuai dengan SAK ETAP :

Tabel 4.5
Laporan arus kas SAK ETAP

KOPERASI WANITA SRI REJEKI LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2016	
Arus kas dari aktivitas operasi :	
Kenaikan kas bersih	Rp. 20.000.000
Intensif pengurus 1 tahun	(Rp. 1.860.000)
Intensif pengawas 1 tahun	(Rp. 570.000)
Biaya Pelaksanaan RAT	(Rp. 1.850.000)

Transpot peserta/undangan RAT	(Rp. 2.150.000)
Pengadaan doorprice RAT	(Rp. 625.000)
Biaya rapat pengurus dan pengawas 1 tahun	(Rp. 750.000)
Biaya peningkatan SDM	(Rp. 925.000)
Biaya pertemuan forum kopwan	(Rp. 535.000)
Biaya seragam pengurus dan pengawas	(Rp. 750.000)
Biaya penyusunan laporan dan pengiriman	(Rp. 600.000)
Biaya ATK dan foto copy	(Rp. 215.000)
Biaya pajak	(Rp. 290.000)
Biaya lembur harian	(Rp. 550.000)
Biaya badan hukum	<u>(Rp. 230.000)</u>
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 2.175.000
Arus kas dari aktivitas Investasi :	
Pelepasan (perolehan) investasi	-
Pelepasan (perolehan) Aset tetap	-
Pelepasan (perolehan) Properti investasi	<u>-</u>
Arus kas dari aktivitas investasi	-
Arus kas dari aktivitas pendanaan	<u>-</u>
Kenaikan kas bersih	<u>Rp. 2.175.000</u>
Kas awal periode	Rp. 7.610.000
Kas akhir periode	Rp. 9.785.000

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Laporan arus kas dari Koperasi Wanita Sri Rejeki tidak diketahui kas dari awal periode dan akhir periode. Sehingga untuk mendapatkan selisih kas sebesar 2.175.000 didapat dari asumsi pengurangan, kas akhir 9.785.000 dikurangi kas awal 7.610.000 didapat selisih kas 2.175.000

4.3.1.4 Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) paragraf 6.1 mengatur persyaratan untuk penyajian perubahan dalam ekuitas entitas selama suatu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu).

paragraf 6.2 menyatakan bahwa Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan yang terjadi pada modal suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. SAK ETAP mewajibkan entitas untuk menyajikan informasi sebagai berikut di dalam laporan perubahan ekuitas: saldo laba pada awal dan akhir periode serta penyajian kembali laba setelah dikoreksi kesalahan atau perubahan kebijakan. Laporan ini harus disiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan pada laporan ini. Laporan perubahan ekuitas harus dibuat sebelum neraca karena jumlah ekuitas pada akhir periode harus dilaporkan pada neraca. Laporan perubahan ekuitas minimal dibuat satu tahun sekali. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan yang diharuskan tercantum dan dibuat secara berkala menurut SAK ETAP.

SAK ETAP paragraph 6.3 Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan :

- a) Laba atau rugi untuk periode
- b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- c) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui.
- d) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan.

Berikut ini laporan perubahan ekuitas yang disajikan oleh Koperasi Wanita

Sri Rejeki :

Tabel 4.6
Permodalan

4. Bidang permodalan

No.	Sumber Modal	Th. Lalu / 2015 (Rp.)	Th. ini /2016 (Rp.)
1.	Modal Sendiri :		
	* Simpanan Pokok	5.000.000,00	5.000.000,00
	* Simpanan wajib	68.210.000,00	87.530.000,00
	* Cadangan	13.877.000,00	19.877.000,00
	* Donasi	50.000.000,00	50.000.000,00
	* Penyertaan	-	-
	* SHU Belum dibagi	17.500.000,00	20.000.000,00
	Jumlah	154.587.000,00	182.407.000,00
Kenaikan / Penurunan = Rp. 27.820.000,- =18.0 % dari tahun lalu			

2.	Modal Pinjaman :		
	2.1 Pinjaman jangka pendek		
	* Hutang dagang	-	-
	* Hutang Bank	-	-
	* Tabungan Koperasi	-	-
	* Dana bagian SHU (Dana Sosial dan dana Pendidikan	3.473.000,00	4.248.000,00
	Jumlah	3.473.000,00	4.248.000,00
	Kenaikan / Penurunan = Rp. 775.000,00 = 22,3 % dari tahun lalu		
	2.2. Pinjaman Jangka Panjang		
	* Hutang Bank jangka panjang	-	-
	* Kredit Investasi	-	-
	Jumlah	-	-
	Kenaikan / Penurunan = Rp. - = - % dari tahun lalu		
	Jumlah Modal pinjaman	3.473.000,00	4.248.000,00
	Kenaikan / Penurunan = Rp. 775.000,00 = 22,3 % dari tahun lalu		

Sumber : Koperasi Wanita Sri Rejeki Tahun 2016

Dalam laporan perubahan ekuitas Koperasi Wanita Sri rejeki belum sesuai dengan SAK ETAP, Karena Koperasi Wanita Sri Rejeki hanya melakukan perhitungan dari modal sendiri dan modal pinjaman, setelah itu ditentukan apakah modal awal mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan dalam SAK ETAP laporan perubahan ekuitas cara penyajiannya yaitu modal awal ditambah jumlah penambahan dikurangi SHU tahun berjalan, maka akan di temukan saldo akhir.

Berikut ini Penyajian laporan perubahan ekuitas yang sesuai dengan SAK ETAP :

Tabel 4.7
Laporan Perubahan Ekuitas SAK ETAP

Koperasi Wanita Sri Rejeki Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2016	
Saldo Awal	Rp. 33.042.000
Simp. Pokok	Rp. 5.000.000
Simp. Wajib	Rp. 87.530.000
Cadangan	Rp. 19.877.000
Modal Penyerta	Rp. -
Donasi	<u>Rp. 50.000.000</u>
Jumlah Penambahan	Rp. 162.407.000
SHU tahun berjalan	<u>Rp. 20.000.000</u>
Saldo Akhir	Rp. 215.449.000

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

4.3.1.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Koperasi Wanita Sri Rejeki dalam penyusunan laporan keuangannya masih belum membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dikarenakan laporan keuangan yang di buat sebelumnya juga masih belum lengkap, hal itu juga didasari dengan keterbatasan pengetahuan dari Koperasi Wanita Sri Rejeki tentang CALK. Berdasarkan wawancara dengan ibu Siti Putikah selaku bendahara pada hari jum'at 17 Januari 2016 pukul 15.20 WIB menyatakan :

“laporan keuangan yang dibuat kemarin saja ternyata banyak yang salah mas, apalagi catatan atas laporan keuangan ? Tambah gak tau saya apa itu catatan atas laporan keuangan”.

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) paragraf 8.1 mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Paragraf 8.2 Catatan Atas laporan Keuangan Harus :

- a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
- b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Paragraf 8.3 Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Tetapi Koperasi Wanita

Sri Rejeki tidak membuat catatan atas laporan keuangan yang menyebabkan kurangnya informasi dalam memahami keberadaan posisi keuangannya.

Koperasi Wanita Sri Rejeki belum Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga penulis merekomendasikan Catatan Atas Laporan Keuangan :

Tabel 4.8
Catatan Atas Laporan Keuangan Kopwan Sri Rejeki

1. Gambaran Umum

a. Pendirian

Koperasi Wanita Sri rejeki didirikan di Blitar pada tahun 2010, Koperasi yang bergerak unit usaha simpan pinjam ini beralamat di Jalan Tidore gang I No.61 Rt.02/Rw. 04 Kelurahan Klampok Kecamatan Sanan Wetan Kota Blitar.

b. Perijinan

Koperasi Wanita Sri Rejeki secara Sah Berbadan Hukum dengan Nomor 56/BH/XVI.30/422.104.1/2010 yang di sah kan oleh Pemerintah pada tanggal 27 Desember tahun 2010.

c. Keanggotaan

Anggota koperasi berasal dari penduduk setempat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah anggota koperasi awal berdiri sebanyak 36 orang dan untuk sekarang anggota koperasi berjumlah sebanyak 100 orang.

2. Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP dan disusun menggunakan *accrual basis* kecuali pada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung yang berfokus pada laba atau rugi bersih dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas yang dikeluarkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah rupiah.

b. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas di tangan pada periode ini sebesar Rp. 7.610.000 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.285.000 dari periode sebelumnya yang berjumlah Rp. 10.615.000 dan tidak ada kas di bank. Kas di tangan digunakan untuk memenuhi biaya operasional sehari-hari, seperti pembelian alat tulis kantor, jasa fotokopi, simpan pinjam dan biaya operasional lainnya.

c. Piutang Usaha

Piutang koperasi ini sendiri dibedakan menjadi 2 yang pertama yaitu piutang simpan pinjam untuk anggota pada periode 2013 yang berjumlah Rp. 290.000.000 dari 81 orang peminjam, yaitu untuk anggota maupun calon/non anggota koperasi yang meminjam uang kepada koperasi untuk mengembangkan usahanya ataupun kebutuhan ekonomi lainnya.

d. Aset Tetap

Pada akun aset tetap koperasi wanita sri rejeki tidak menjelaskan besarnya nominal uang.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan yang diterima oleh Koperasi berasal dari pendapatan jasa unit Simpan Pinjam yang pada periode ini berjumlah Rp. 31.900.000 Sedangkan beban diperoleh dari Beban Penyusutan, beban RAT, beban Operasional serta beban Administrasi dan Umum yang pada periode ini berjumlah Rp. 11.900.000.

f. Hutang

Hutang Koperasi berupa hutang lancer, simpanan manasuka, dana sosial, dana pendidikan yang tercatat pada periode 2016 sebesar Rp. 4.248.000.

g. Perpajakan

Pajak yang dikenakan pada koperasi wanita sri rejeki adalah PPh Pasal 23 sebesar 15% dari SHU koperasi karena berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, SHU termasuk ke dalam pengertian dividen yang merupakan objek PPh sehingga harus dilaporkan dalam SPT Tahunan penerima. Jadi pajak koperasi periode 2016 sebesar Rp. 3.000.000.

h. SHU

SHU tahun berjalan koperasi yang semula sebesar Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 3.000.000 akibat pengurangan pajak. Dan SHU ini dibagikan untuk SHU anggota 45%, Cadangan sebesar 30%, dana pengurus sebesar 10%, Dana pengawas sebesar 2,5%, Dana Karyawan 2,5%, Dana sosial 5%, Dana Pendidikan 5%.

Sumber : Data Diolah Tahun 2017

Pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar memiliki banyak manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan evaluasi, apa saja kekurangan dan kelalaian selama ini, sudah benarkah penggunaan dana yang ada. Sehingga untuk kedepannya Koperasi Wanita Sri Rejeki bisa menjadi lebih baik. Bisa hati-hati dalam menggunakan dana.
2. Mengetahui besarnya pendapatan dan pengeluaran sehingga laba/rugi dari Koperasi bisa diketahui melalui laporan keuangan.
3. Dengan laporan keuangan yang sesuai dengan standar bisa dijadikan untuk mengajukan modal usaha kepada pihak bank maupun investor. Karena salah satu syarat untuk mengajukan kredit atau pendanaan adalah laporan keuangan.
4. Sebagai acuan dalam hal pengambilan keputusan terutama bagi pemimpin perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan maka pemimpin dituntut untuk cepat mengambil keputusan, jika memiliki dana yang berlebih mau diapakan dana tersebut sehingga perusahaan bisa menjadi berkembang. Jika kekurangan dana maka apa yang harus dilakukan ketua apakah pinjam dana atau bagaimana. Maka dari itu laporan keuangan sangat bermanfaat bagi kelangsungan jalannya koperasi.

4.3.2 Kendala yang dihadapi Koperasi Wanita Sri Rejeki dalam penerapan

SAK ETAP

Penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini karena adanya faktor penghambat yang

menyebabkan sulitnya penerapan SAK ETAP tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis terdapat beberapa hal yang menghambat penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki :

1. Rendahnya pemahaman tentang SAK ETAP.
2. Rata-rata pengurus atau pengawas sudah tua.
3. Kurangnya sosialisasi terkait laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku pencetus pedoman standar ini.
4. Belum adanya pendampingan yang intensif terkait penerapan SAK ETAP oleh Dinas UKM dan KOPERASI dikota Blitar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan SAK ETAP dalam laporan keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi Wanita Sri Rejeki terdiri atas Neraca, Laporan Hasil Usaha, Permodalan. Hal ini masih belum sesuai dengan standar SAK ETAP. Di dalam SAK ETAP disebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Dalam pengakuan, pengukuran, penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dengan benar. Karena Koperasi Wanita Sri Rejeki masih menggunakan metode pencatatan *cash basis* sedangkan menurut SAK ETAP harus menggunakan *accrual basis*.
3. Kendala dari Koperasi wanita Sri Rejeki dalam menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya adalah sebagai beriku:
 - a. Rendahnya pemahaman pengurus terhadap SAK ETAP.
 - b. Kurangnya sosialisasi terkait Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku pencetus pedoman standar ini.

- c. Belum adanya pendampingan yang intensif terkait penerapan SAK ETAP oleh badan UKM terkait.
- d. Tidak adanya pengawasan dari pihak – pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan Koperasi wanita sri Rejeki.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberika saran dalam upaya pembenahan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi wanita Sri Rejeki :

A. Bagi Perusahaan

1. Dalam pembahasan sudah disediakan rekomendasi laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP, sehingga rekomendasi bisa diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan selanjutnya.
2. Merubah dasar pencatatan dari *cash basis* menjadi *accrual basis* seperti yang sudah ditetapkan SAK ETAP untuk laporan keuangan UMKM.
3. Entitas terkait sebaiknya memberikan pemahaman tentang SAK ETAP kepada UMKM sehingga laporan keuangan yang mereka buat akan sesuai dengan standar.
4. Adanya sosialisasi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku pencetus pedoman SAK ETAP.
5. Adanya pendampingan dari pihak berwenang yang intensif dan memberi bimbingan mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

B. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan objek berbeda dari penelitian selanjutnya sehingga dapat merekomendasikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP pada UMKM yang lain
2. Dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan penelitian ini sehingga penelitian selanjutnya diharapkan akan lebih sempurna



Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan

Andang, S. 2013. *Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.

Fanny. 2012. Contoh Membuat Akuntansi Excel

Hapsari, M. 2013. *Implementasi Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) Pada CV.Sapta Putra Mekar*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

Hartono, J. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 6. Yogyakarta, Indonesia:BPFE, UGM.

Hapsari, M. 2013. *Implementasi Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) Pada CV.Sapta Putra Mekar*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

Herujianto. 2002. *Pelajaran Ekonomi*. Jakarta: Yudhistira

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Per 1 Oktober*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Kasmir, 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kieso, Donald E, Jerry weygant dan Terry Warfield. 2011. “*Intermediate Accounting*”. Volume 1. Terjemahan Emil Salim. Erlangga: Jakarta.

Ma' rifatul, Iim. 2012. *Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP UKM Kampung Batik di Sidoarjo*. STIE Perbanas, Surabaya.

Martani, Dwi., Sylvia Veronica NPS. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK*. Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.

Meleong, Lexy J. 2012. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. PT Remaja Rosdakarya:

Bandung.

Mulyani. 2013. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjung*

Pinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjung Pinang.
Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Pattilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Saptantinah, Dewi. 2010. *Perlunya Penerapan Sistem Akuntansi pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Bengkel Aksesories dan Variasi Goro Profesional di Jalan Bayangkara, Solo)*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Solo.

Senoaji, Adtya Rizky. 2014. *Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyusunan laporan keuangan UKM di kabupaten Kudus*. Studi Kasus UKM Padarunan jaya. Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semarang: universitas diponegoro.

Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Siswono, Adi. 2014. *Penerapan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis SAK ETAP*. Studi Kasus di UKM Brebes Fried Chichken.

Suhairi. 2006. *Persepsi Akuntansi Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil dan Menengah*. Makalah yang disampaikan pada SNAIX Padang.

Tanugraha, J. 2012. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada PT. Tunas Dwipa Matra (TDMN)*. Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Wahyuni, et al. 2013. *Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP dengan Pendekatan Disclosure Index pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "SETIA" Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1 (1), hal. 1.

Yadiati, W. Dan Ilham Wahyudi. 2006. *Pengantar Akuntansi*. Prenada Media Group. Jakarta.

LAMPIRAN

Neraca Koperasi Wanita Sri Rejeki



KOPERASI WANITA " SRI REJEKI "
 Badan Hukum No.56/BH/XVI.30/422.104.1/2010 ,Tgl : 27 Desember 2010
 Jl.Tidore Gang I No 61 (0342) 808218 Kelurahan Klampok Kota BLITAR

**3.2.3.NERACA KOPERASI WANITA SRI REJEKI
 PERIODE DESEMBER TH.2015 DAN DESEMBER TH. 2016**

AKTIVA	Tahun 2015 (RP)	Tahun 2016 (RP)	PASIVA	Tahun 2015 (RP)	Tahun 2016 (RP)
Aktiva Lancar			Hutang Lancar		
- Kas	7.610.000,00	9.785.000,00	- Simpanan Manasuka	-	-
-Bank	150.000,00	150.000,00	- Dana Sosial	1.974.000,00	2.049.000,00
-Piutang S/P	132.800.000,00	156.720.000,00	- Dana Pendidikan	1.499.000,00	2.199.000,00
-			-	0,00	0,00
-			-		
Jml Aktiva Lancar	140.560.000,00	166.655.000,00	Jml Hutang Lancar	3.473.000,00	4.248.000,00
Penyertaan	-	-	Hutang Jangka panjang	-	-
-			- Hutang	-	-
-			-Hutang.....	-	-
Jumlah penyertaan	-	-	Jml Hutang Jangka Panjang	-	-
Aktiva tetap	-	-	Modal sendiri		
-Tanah	-	-	-Simpanan pokok	5.000.000,00	5.000.000,00
-Bangunan	-	-	-Simpanan wajib	68.210.000,00	87.530.000,00
-Peralatan	-	-	-Donasi	50.000.000,00	50.000.000,00
-			-Cadangan Koperasi	13.877.000,00	19.877.000,00
-			-Cadangan Resiku	-	-
-			-SHU Tahun Berjalan	0,00	0,00
Jumlah Aktiva Tetap	-	-	Jumlah Modal sendiri	137.087.000,00	162.407.000,00
JUMLAH AKTIVA	140.560.000,00	166.655.000,00	JUMLAH PASIVA	140.560.000,00	166.655.000,00

Blitar, 31 Desember 2016
 Pengurus Kopwan " Sri Rejeki "

Pengawas

 SUKANTISE

Ketua

 MU'ANAHS.Pd

Bendahara

 SITI PUTIKAH.S.Pd

Laporan Laba Rugi Koperasi Wanita Sri Rejeki



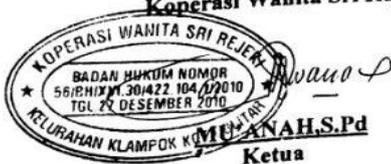
KOPERASI WANITA "SRI REJEKI"
 Badan Hukum No.56/BH/XVI.30/422.104.1/2010, tgl 27 Desember 2010
 Jl. Tidore 1 No 61 (0342) 808218 Kelurahan Klampok Kota BLITAR

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA (RAPB) KOPERASI WANITA SRI REJEKI TAHUN 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)		
		REALISASI TAHUN.2016	RENCANA TAHUN 2017	
I	PENDAPATAN			
	Pendapatan Jasa Pinjaman			
	Pendapatan Administrasi	29.000.000,00	34.800.000,00	
	Jumlah Pendapatan	29.000.000,00	34.800.000,00	
II	BIAYA-BIAYA			
	1. Biaya Organisasi			
	Insentif Pengurus 1 th	1.860.000,00	2.000.000,00	
	Insentif Pengawas 1 th	570.000,00	630.000,00	
	Blaya Pelaksanaan RAT	1.850.000,00	1950.000,00	
	Transport Peserta/ undangan RAT	2.150.000,00	2.150.000,00	
	Pengadaan Doorprisce RAT	625.000,00	725.000,00	
	Blaya Rapat Pengurus dan Pengawas 1 th	750.000,00	850.000,00	
	Blaya Peningkatan SDM / Diklat dan Rapat Kekuar	925.000,00	1.250.000,00	
	Blaya pertemuan dan arisan Forum Kopwan se kota	535.000,00	950.000,00	
	Blaya Seragam pengurus & Pengawas	750.000,00	-	
	Blaya penyusunan & pengiriman Laporan & Pajak 1 Th	600.000,00	600.000,00	
	Jumlah Biaya Organisasi	10.615.000,00	11.105.000,00	
	2. Biaya Administrasi			
	Blaya ATK rutin dan Foto Copy	215.000,00	550.000,00	
	Blaya Pajak	290.000,00	350.000,00	
	Blaya Penyusutan Aktiva Tetap	-	-	
	Blaya Pemeliharaan Kantor dan Pengadaan Inventaris	-	825.000,00	
	Blaya Peringatan Hari Besar Nasional & Harkop	550.000,00	700.000,00	
	Blaya Lembur Pengurus Harian	230.000,00	250.000,00	
	Blaya Badan Hukum	-	-	
	Jumlah Biaya Administrasi	1.285.000,00	2.675.000,00	
	Total Biaya	11.900.000,00	13.280.000,00	
		SISA HASIL USAHA/ SHU DARI JASA DAN ADMINISTRASI	20.000.000,00	24.500.000,00

Blitar, 18 Oktober 2016
 Koperasi Wanita Sri Rejeki

SUKANTLASE
 Pengawas



SITI PUTRI KAH, S.Pd
 Bendahara

Permodalan Koperasi wanita Sri Rejeki

4. Bidang permodalan

No.	Sumber Modal	Th. Lalu / 2015 (Rp.)	Th. ini /2016 (Rp.)
1.	Modal Sendiri :		
	* Simpanan Pokok	5.000.000,00	5.000.000,00
	* Simpanan wajib	68.210.000,00	87.530.000,00
	* Cadangan	13.877.000,00	19.877.000,00
	* Donasi	50.000.000,00	50.000.000,00
	* Penyertaan	-	-
	* SHU Belum dibagi	17.500.000,00	20.000.000,00
	Jumlah	154.587.000,00	182.407.000,00
Kenaikan / Penurunan = Rp. 27.820.000,- =18.0 % dari tahun lalu			

2.	Modal Pinjaman :		
	2.1 Pinjaman jangka pendek		
	* Hutang dagang	-	-
	* Hutang Bank	-	-
	* Tabungan Koperasi	-	-
	* Dana bagian SHU (Dana Sosial dan dana Pendidikan	3.473.000,00	4.248.000,00
	Jumlah	3.473.000,00	4.248.000,00
Kenaikan /Penurunan = Rp. 775.000,00= 22,3 % dari tahun lalu			
	2.2. Pinjaman Jangka Panjang		
	* Hutang Bank jangka panjang	-	-
	* Kredit Investasi	-	-
	Jumlah	-	-
Kenaikan / Penurunan = Rp. - = - % dari tahun lalu			
	Jumlah Modal pinjaman	3.473.000,00	4.248.000,00
Kenaikan /Penurunan = Rp. 775.000,00 = 22.3 % dari tahun lalu			

Wawancara kepada pengurus Koperasi Wanita Sri Rejeki.

1. Bagaimana laporan keuangan yang diterapkan dalam Koperasi wanita Sri Rejeki ?

Jawaban: *“Laporan keuangan itu sangat penting, karena dengan mencatat laporan keuangan, Koperasi akan mengetahui transaksi apa saja yang dilakukan setiap harinya, dan juga untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran kas. Koperasi Wanita Sri Rejeki hanya mencatatkan pemasukan dan pengeluaran”*. (Hari Jum’at tanggal 14 Februari 2017 14.00 WIB)

2. Bagaimana pencatatan laba rugi dalam Koperasi Wanita Sri Rejeki ?

Jawaban: *“Pencatatan laporan laba rugi di dapat dari semua pendapatan di kurangi beban-beban yang di keluarkan. Tidak memasukkan HPP dalam di dalam laporan laba rugi karena keterbatasan pengetahuan tentang pencatatan laporan laba rugi”*. (Hari Jum’at tanggal 14 Februari 2017 14.05 WIB)

3. Bagaimana system pencatatan laporan keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki ?

Jawaban: *“Pencatatan laporan keuangan kita ya pembukuan gini mas. Taunya seperti ini, sederhana mudah. Tapi ya gtu kurang detail informasi tentang keuangan saya”*. (Hari Jum’at tanggal 14 Februari 2017 14.10 WIB)

4. Bagaimana Koperasi Wanita Sri Rejeki menyusun laporan keuangan ?

Jawaban: *“Laporan keuangan yang dibuat kemarin saja ternyata banyak yang salah mas, apalagi cacatan atas laporan keuangan? Tambah gak tau saya apa itu catatan atas laporan keuangan”*. (Hari Jum’at tanggal 14 Februari 2017 14.15 WIB)

5. Bagaimana Koperasi Wanita Sri Rejeki mencatat pendapatan yang telah diperoleh?

Jawaban: *“Semua pencatatan kita catat di laporan laba rugi, supaya tahu berapa pendapatan kita selama ini”*. (Hari Jum’at tanggal 14 Februari 14.20 2017 WIB).

6. Apakah Koperasi Wanita menyusun laporan keuangan sudah sesuai standar keuangan yang benar?

Jawaban: *“Belum mas, para pengurus disani rata-rata sudah lanjut usia dan cara pencatatannya pun masih menggunakan metode manual, jadi belum mengetahui bagaimana menyusun laporan keuangan yang benar, harapan kami semoga setelah ini ada pelatihan dari dinas koperasi tentang menyusun laporan keuangan secara benar”*. (Hari Jum’at tanggal 14 Februari 2017 14.25WIB)

7. Bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan Koperasi Wanita Sri Rejeki?

Jawaban: *“Pengambilan keputusan terkait koperasi berdasarkan kebijakan saya (Ketua). Kebijakan yang saya ambil juga berdasarkan pengalaman selama ini dan juga kondisi yang sedang dihadapi. Mau*

ambil keputusan berdasarkan laporan keuangan juga kurang jelas soalnya". (Hari Jum'at tanggal 14 Februari 2017 14.30 WIB).

8. Berapakah modal awal Koperasi wanita Sri Rejeki?

Jawaban: *"modal awalnya dulu sekitar 50.0000.000 mas"*. (Hari Jum'at tanggal 14 Februari 2017 14.35 WIB)

9. Kepada siapakah memperinggungjawabkan laporan keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki?

Jawaban: *"Pertanggungjawaban laporan pasti itu kepada ibuk (ketua), apabila terkait administrasi harus dilaporkan apapun itu"*. (Hari Jum'at tanggal 14 Februari 2017 14.40 WIB)

10. Apa harapan ibu setelah saya melakukan penelitian disini?

Jawaban: *"Pastinya saya berharap masnya bisa membenarkan laporan keuangan Koperasi Wanita Sri Rejeki yang sesuai dengan standar akuntansi yang benar"*. (Hari Jum'at tanggal 14 Februari 2017 14.45 WIB)

11. Apa ibu mengerti tentang SAK ETAP?

Jawaban: *"Dulu Pernah ada pelatihan tentang SAK ETAP dari Dinas UKM dan Koperasi Di kota Blitar mas, tapi karena faktor usia sekarang sudah lupa itu mas"*. (Hari Jum'at tanggal 14.50 WIB).



KEMENTERIAN AGAMA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ Ak-X/S1/II/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

Rekapitulasi Pembimbingan

Nama Mahasiswa : Ahmad Riza Fahtaromi
NIM/Konsentrasi : 12520101/Akuntansi Keuangan
Nama Dosen Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA
Mulai Bimbingan : 22 Desember 2016
Terakhir Bimbingan :

No	Tanggal Bimbingan	Topik Bimbingan	Tanda Tangan Dosen Pembimbing
1.	25 Agustus 2016	Outline	1. <i>Ahmad Riza</i>
2.	19 September 2016	Pemberian surat bimbingan skripsi	2. <i>Ahmad Riza</i>
3.	22 Desember 2016	Bimbingan Bab I, II, III	3. <i>Ahmad Riza</i>
4.	03 Januari 2017	Revisi Bab I, II, III	4. <i>Ahmad Riza</i>
5.	09 Januari 2017	Revisi dan Acc Proposal	5. <i>Ahmad Riza</i>
6.	17 Januari 2017	Seminar Proposal	6. <i>Ahmad Riza</i>
7.	20 Januari 2017	Acc Proposal	7. <i>Ahmad Riza</i>
8.	01 Maret 2017	Bimbingan Bab IV	8. <i>Ahmad Riza</i>
9.	03 Maret 2017	Revisi Bab IV	9. <i>Ahmad Riza</i>
10.	03 April 2017	Bimbingan Bab IV dan Bab V	10. <i>Ahmad Riza</i>
11.	04 April 2017	Revisi Bab IV dan Bab V	11. <i>Ahmad Riza</i>
12.	05 April 2017	Acc Ujian Skripsi	12. <i>Ahmad Riza</i>

Jumlah Pertemuan :
Lama Bimbingan :

Mengetahui



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197203222008012005

BIODATA PENULIS

	<p>Penulis bernama Ahmad Riza Fahtaromi yang dilahirkan di jombang, 01 September 1993, anak ke 6 dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak H. Mahfudz Amin dan Ibu Hj. Siti Mubarroh. Beralamat di jalan Yos Sudarso RT 004 RW 011 Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten jombang.</p>
---	--

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis :

1998-2000	TK Muslimat Catak Gayam
2000-2006	MI Darul Faizin Catak Gayam
2006-2009	MTs Nurul Huda Jarak Kulon
2009-2012	MAN Rejoso Peterongan
2012-2017	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan non formal :

2012-2013	Mahad Sunan Ampel Al-aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2012-2013	Kuliah khusus Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2014-2015	Kuliah Wajib Bahasa Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang